



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



2024

LAPORAN KINERJA PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Laporan Kinerja PSKP Tahun 2024

Copyright

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
2025

Penyusun

Bonifatius Galih Krismahardhika
Kurniawan Hanafie
Esy Andriyani
Rudi Supratman
Aldya Rachma Nurzaelan

Pereviu

Andry Rihardika
Nur Berlian Venus Ali
Fransisca Nur'aini Krisna
Lukman Solihin
Ikhya Ulumudin
Ihya Ulumuddin
Hasti Kusumawati

Desain dan Tata Letak

Fardelia Nurhaliza

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks.+6221-5741664
Laman: <https://pskp.kemdikbud.go.id>
Pos-el: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2024. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2024 menetapkan 2 sasaran dan 5 indikator kinerja. Secara umum Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan telah meraih banyak capaian keberhasilan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Tantangan tersebut di antaranya koordinasi dengan pihak eksternal yang dirasa belum optimal, perlunya peningkatan jumlah pengembangan kompetensi SDM, serta dinamika kebijakan penganggaran yang menantang sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menyajikan gambaran objektif tentang berbagai kinerja yang telah diraih pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2024.

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



Irsyad Zamjani, Ph.D



DAFTAR ISI

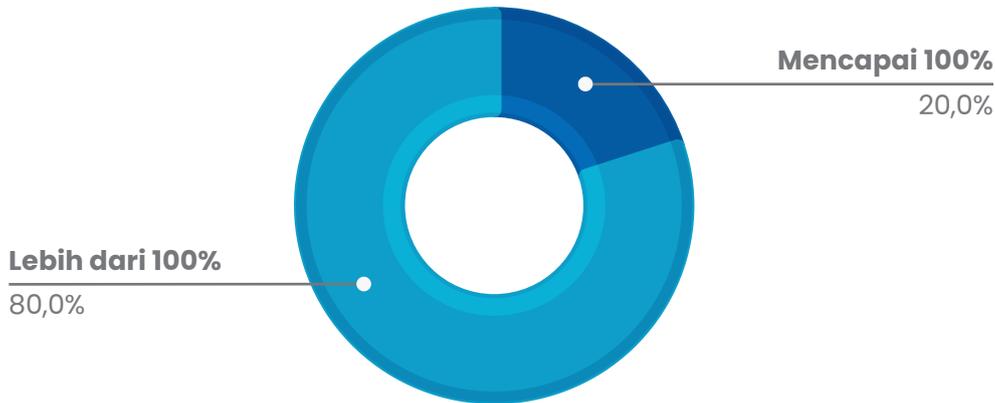
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSESKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Program Prioritas 2022-2024	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran	11
D. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Akuntabilitas Kinerja	17
B. Realisasi Program/Agenda Prioritas.....	49
C. Realisasi Anggaran.....	49
D. Kinerja Lain-lain.....	50
BAB IV PENUTUP	56
Lampiran.....	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan 2024 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III.

Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Capaian 2024



IKK 2.1
Predikat SAKIP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Target	Capaian
A	AA

Kinerja Realisasi Anggaran

Pagu	Rp 48.243.793.000
Realisasi	Rp 44.701.500.424
Anggaran	Rp 3.542.292.576

Berikut tren alokasi anggaran PSKP dari tahun 2022 sampai 2024



Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan. Penurunan alokasi anggaran tersebut menunjukkan adanya upaya efisiensi anggaran tanpa menurunkan target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya, penurunan anggaran secara spesifik terjadi pada alokasi belanja operasional.

Berikut ini tantangan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tahun 2024:

1. dinamika penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan intervensi serta monitoring dan evaluasi
2. jumlah SDM yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
3. perlunya peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas SDM
4. dinamika kebijakan penghematan anggaran yang menyebabkan tahapan kegiatan tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan intervensi serta monitoring dan evaluasi

2. berbagai tim di Pusat standar dan Kebijakan Pendidikan saling berbagi dan membantu tim lainnya serta melakukan melakukan rekrutmen peneliti lapangan
3. fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang analisis data serta penyusunan rekomendasi dan publikasi kebijakan
4. kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan prioritas kajian dan alternatif lain, seperti rapat dalam kantor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pertama kali dibentuk tahun 2021 sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sejak 28 Agustus tahun 2021, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dipimpin oleh Irsyad Zamjani, Ph.D. dengan komposisi SDM sebanyak 64 orang. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mempunyai wilayah kerja di Kompleks Kemendikbudristek Gedung E Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mempunyai tugas “Melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, dan analisis kebijakan pendidikan.”

Fungsi:

Dalam mengemban tugas tersebut, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan kebijakan di bidang standar pendidikan;
2. Pelaksanaan penyusunan standar di bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan;
4. Koordinasi dan fasilitasi di bidang standar dan kebijakan pendidikan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar dan kebijakan pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Struktur Organisasi



D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah maju dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)

Kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi pemerataan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas. Perbedaan signifikan terlihat antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), terutama dalam hal infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, dan akses terhadap teknologi pendukung pembelajaran. Faktor geografis, keterbatasan anggaran daerah, dan disparitas dalam implementasi kebijakan pendidikan turut memperparah masalah ini. Akibatnya, siswa di

daerah terpencil sering kali tertinggal dalam hal hasil belajar, terutama pada kemampuan literasi dan numerasi, dibandingkan dengan siswa di wilayah yang lebih maju.

2. Implementasi Kurikulum Nasional

Kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan sebagai Kurikulum Nasional memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apabila didukung oleh kebijakan pelatihan guru yang komprehensif, pendampingan yang berkelanjutan, dan penyediaan sumber belajar yang inklusif dan berbasis teknologi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan sesuai tujuan. Implementasi kurikulum nasional menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman dan kapasitas tenaga pendidik dalam mengadopsi prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran terdiferensiasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah, terutama di daerah 3T, memperburuk kesenjangan dalam implementasi kurikulum.

3. Inklusivitas pendidikan

Inklusivitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam menjamin akses yang setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, siswa dari komunitas adat terpencil, serta kelompok rentan lainnya. Keterbatasan fasilitas fisik seperti sekolah ramah disabilitas, kurangnya guru dengan keahlian khusus di bidang pendidikan inklusif, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusivitas memperburuk kesenjangan dalam layanan pendidikan. Selain itu, belum optimalnya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah sering kali membuat siswa dari kelompok rentan terpinggirkan.

Peran Strategis

1. Berperan penting dalam pengembangan Standar Pendidikan dengan Paradigma Baru.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan standar pendidikan dengan paradigma baru, melakukan kajian dan analisis yang relevan untuk mendukung pengembangan standar pendidikan, melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog dan

diskusi pada proses pengembangan standar pendidikan, dan melakukan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Standar pendidikan.

2. Berperan penting untuk mendorong kebijakan berbasis bukti melalui kajian dan evaluasi kebijakan.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berperan dengan melakukan kajian/analisis maupun evaluasi secara berkala untuk melihat bagaimana kebijakan di bidang pendidikan diimplementasikan dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Kajian/analisis maupun evaluasi yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan yang diambil oleh pemerintah didasari oleh bukti empiris.

3. Berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan Rapor Pendidikan untuk Evaluasi Sistem Pendidikan.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menjadi *leading sector* dalam pengembangan secara kolaboratif Rapor Pendidikan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Secara khusus Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan bertanggungjawab dalam mengembangkan indikator yang digunakan dalam Rapor Pendidikan, melakukan analisis terhadap hasil Rapor Pendidikan, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi dan dampak Rapor Pendidikan bagi masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi:

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2020-2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

“Menuju implementasi standar dan kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan berkembang.”

Sebagai sebuah unit kerja strategis, PSKP diharapkan dapat berperan dalam mendukung implementasi standar dan kebijakan pendidikan pada tahapan penyusunan dan evaluasi kebijakan. Dengan dukungan-dukungan tersebut, unit-unit kerja yang terlibat dalam menyusun kebijakan pendidikan diharapkan dapat makin kapabel dalam membuat kebijakan pendidikan relevan, berkualitas, dan berkembang. Relevan artinya kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi, baik di pusat maupun daerah. Berkualitas artinya kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya sebatas administrasi tetapi juga berbobot dan berdampak pada peningkatan indikator-indikator pendidikan. Berkembang artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan baik dan hasil evaluasinya benar-benar digunakan untuk perbaikan kebijakan.

Misi:

Misi Pertama: “Menyusun standar pendidikan yang relevan dengan penyempurnaan berkelanjutan”

Standar pendidikan yang relevan perlu disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan penyempurnaan dari standar yang sudah ada. Dalam melakukan proses tersebut, PSKP perlu menyusun alur pengembangan standar pendidikan dengan rapi. Alur penyempurnaan tersebut, sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2021, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pada prosesnya, penyempurnaan tersebut harus mempertimbangkan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Misi Kedua: “Mendukung kebijakan pendidikan yang strategis dan berdampak sistemis”

Kebijakan pendidikan perlu disusun dengan dukungan data, temuan, dan pertimbangan lain yang relevan. Oleh karena itu, PSKP perlu mendukung penyusunan kebijakan pendidikan melalui beberapa rumpun kegiatan.

Strategi Kegiatan 1: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan

Kajian strategis adalah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh PSKP dalam mempersiapkan dan mendukung proses penyusunan kebijakan pendidikan strategis pada tingkat nasional. Pada kegiatan ini, PSKP mengumpulkan data-data secara umum untuk memetakan permasalahan pendidikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, PSKP akan menyusun prioritas-prioritas masalah dan mencari solusi yang relevan, baik yang diformulasikan sendiri maupun yang diadaptasi dari praktik di tempat lain.

Hasil studi strategis dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan oleh PSKP maupun unit lain di Kemendikbudristek. Dalam hal ini, PSKP berperan dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Strategi Kegiatan 2: Evaluasi Cepat Kebijakan Pendidikan

Evaluasi cepat dapat dilakukan sewaktu waktu untuk menunjukkan dampak awal dari implementasi suatu kebijakan. Evaluasi cepat memiliki siklus, cakupan, dan metode yang lebih sederhana dari evaluasi dampak pada umumnya. Pengambil kebijakan dapat melihat sinyal awal implementasi kebijakan untuk menjadi dasar dalam memutuskan tindak lanjut pada kebijakan terkait.

Strategi Kegiatan 3: Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kajian kebijakan pendidikan yang menyeluruh yang mengobservasi tidak hanya segi luaran dan hasil, tetapi juga dampak yang lebih luas. Evaluasi kebijakan pendidikan umumnya dilakukan dalam beberapa tahun agar secara utuh memberikan data dan informasi bagaimana proses kebijakan tersebut diimplementasikan pada tahap awal hingga berdampak.

Strategi Kegiatan 4: Dukungan Fasilitasi Kebijakan Pendidikan

Proses penyusunan kebijakan pendidikan merupakan beban pekerjaan yang relatif besar. Karena besarnya beban dan begitu penting hasilnya, PSKP perlu mengambil peran fasilitasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyusunan

kebijakan pendidikan yang sebatas administrasi saja. Selain itu, PSKP juga dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan pendidikan, baik di pusat maupun daerah, selaras dan saling melengkapi. Bentuk dukungan kebijakan yang dapat dilakukan PSKP antara lain terlibat sebagai fasilitator dalam diskusi-diskusi kebijakan, menyediakan informasi dan pertimbangan yang relevan, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpeluang mengatasi masalah-masalah prioritas yang ada di tingkat pusat dan spesifik di daerah.

Strategi Kegiatan 5: Pengelolaan Kolaborasi Studi Kebijakan

Perlu disadari bahwa PSKP bukanlah satu-satunya unit kerja yang melakukan kajian kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran sebagai pengelola studi (*research manager*) yang dapat memetakan pihak mana saja yang melakukan kajian kebijakan apa saja. Jika dirasa perlu, PSKP pun dapat menjadi jembatan kolaborasi antar pihak yang melakukan kajian kebijakan. Selain itu, PSKP juga dapat menjadi wadah yang melakukan kurasi kajian kebijakan pendidikan dan meneruskannya kepada unit-unit kerja terkait di Kemendikbudristek sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Misi Ketiga: “Mengembangkan kapasitas lembaga untuk tumbuh dan berkolaborasi”

Dalam melaksanakan dua strategi sebelumnya, PSKP perlu memastikan adanya ruang perubahan untuk tumbuh dan berkolaborasi. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang hasil pekerjaannya bertumpu pada produktivitas sumber daya manusia, PSKP juga perlu memasukkan agenda pengembangan lembaga sebagai strategi utama.

Ada dua komponen yang penting PSKP perhatikan dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Pertama, PSKP perlu meningkatkan kualitas SDM dan pola kerja agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Kedua, mengingat pemangku kepentingan PSKP ada di pusat dan daerah, PSKP juga perlu meningkatkan kapasitas untuk menampilkan diri dan berkomunikasi ke luar, termasuk kepada publik.

Tujuan Strategis

“Menuju implementasi standar dan kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan berkembang.”

Makna dari Tujuan Strategis PSKP :

Sebagai sebuah unit kerja strategis, PSKP diharapkan dapat berperan dalam mendukung implementasi standar dan kebijakan pendidikan pada

tahapan penyusunan dan evaluasi kebijakan. Dengan dukungan-dukungan tersebut, unit-unit kerja yang terlibat dalam menyusun kebijakan pendidikan diharapkan dapat makin kapabel dalam membuat kebijakan pendidikan relevan, berkualitas, dan berkembang.

Relevan artinya kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi, baik di pusat maupun daerah. Berkualitas artinya kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya sebatas administrasi tetapi juga berbobot dan berdampak pada peningkatan indikator-indikator pendidikan. Berkembang artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan baik dan hasil evaluasinya benar-benar digunakan untuk perbaikan kebijakan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja.

Matriks Kinerja

Keberhasilan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-nya dapat diukur melalui pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) yang diampu oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai Unit Eselon II di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Pencapaian Sasaran Kegiatan dijabarkan melalui pemenuhan dan/atau capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan (SK) I

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

IKK 2.2.9.1 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan			
2020 (<i>baseline</i>)	2022	2023	2024
54	13	13	13

IKK 2.2.9.2 Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan			
2020 (<i>baseline</i>)	2022	2023	2024
-	10	10	10

IKK 2.2.9.3 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan			
2020 (<i>baseline</i>)	2022	2023	2024
-	-	15	17

Sasaran Kegiatan (SK) II

Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

IKK Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan			
2020 (<i>baseline</i>)	2022	2023	2024
-	A	A	A

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan			
2020 (<i>baseline</i>)	2022	2023	2024
-	90,05	90,05	90,05

B. Program Prioritas 2022-2024

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta bersinggungan dengan beberapa Episode Merdeka Belajar, yaitu:

Episode 1. Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Episode 3. Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

Episode 5. Guru Penggerak

Episode 7. Program Sekolah Penggerak

Episode 8. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan

Episode 15. Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Episode 19: Rapor Pendidikan Indonesia

Episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia

Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, sebagai berikut:

No	Nama Program Prioritas	Target 2024	Alokasi Anggaran 2024 Pagu Awal	Alokasi Anggaran 2024 Pagu Akhir
1	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	15	Rp 16.067.685.000	Rp 16.067.685.000
2	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	3	Rp 6.420.396.000	Rp 6.420.396.000
3	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	10	Rp 11.188.723.000	Rp 11.188.723.000

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, menyusun rencana kerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2022-2024 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Sejak Tahun 2022 sebesar Rp 54.063.246.000,00 telah dianggarkan sebagai anggaran PSKP pada PAGU awal. Pada PAGU awal Tahun 2024 besar anggaran yang diberikan kepada PSKP sebesar Rp 50.821.922.000,00, Anggaran ini terus menurun karena penyesuaian jumlah gaji dan tunjangan yang menyesuaikan dengan jumlah pegawai PSKP dimana pada tahun 2021 sebagian peneliti di PSKP berpindah ke BRIN sehingga anggaran gaji dan tunjangan yang tersisa masih cukup besar. Anggaran gaji dan tunjangan ini kemudian mulai dikurangi menyesuaikan dengan jumlah staf di PSKP.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Kode	Satker/Program/ Kegiatan/KRO/ RO/Komponen	Satuan	Target	Pagu Awal	Pagu Akhir
023.11	Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan			50.821.922.000	48.243.793.000
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			33.676.804.000	33.676.804.000
WA	Program Dukungan Manajemen			17.145.118.000	14.566.989.000
690517	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan			50.821.922.000	48.243.793.000
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			33.676.804.000	33.676.804.000
6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan			33.676.804.000	33.676.804.000
PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan		28	33.676.804.000	33.676.804.000
001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Pendidikan	15	16.067.685.000	16.067.685.000
051	Penyusunan Desain			1.743.127.000	2.462.323.000
052	Pelaksanaan			11.447.802.000	11.139.830.000
053	Penyusunan Laporan			2.876.756.000	2.465.532.000
002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Pendidikan	3	6.420.396.000	6.420.396.000
051	Persiapan			279.720.000	535.706.000
052	Pelaksanaan			5.354.340.000	4.825.528.000
053	Penyusunan Laporan			786.336.000	1.059.162.000
003	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Pendidikan	10	11.188.723.000	11.188.723.000
051	Penyusunan Desain			1.802.890.000	1.979.371.000
052	Pelaksanaan			4.372.395.000	5.451.988.000
053	Sinkronisasi dan Harmonisasi			3.493.950.000	2.057.018.000
054	Perumusan Kebijakan			1.519.488.000	1.700.346.000

Kode	Satker/Program/ Kegiatan/KRO/ RO/Komponen	Satuan	Target	Pagu Awal	Pagu Akhir
WA	Program Dukungan Manajemen			17.145.118.000	14.566.989.000
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud			17.145.118.000	14.566.989.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			17.145.118.000	14.566.989.000
956	Layanan BMN	Layanan	1	-	10.000.000
962	Layanan Umum	Layanan	1	1.000.000.000	990.000.000
065	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Satker			179.348.000	123.174.000
066	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan satker			386.282.000	410.184.000
067	Pengelolaan kepegawaian Satker			138.912.000	109.206.000
068	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan satker			295.458.000	347.436.000
994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	16.145.118.000	13.566.989.000
001	Gaji dan Tunjangan			13.445.783.000	9.361.956.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.699.335.000	4.205.033.000

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan sasaran, indikator, dan target selama tiga tahun sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2022		Target 2023		Target 2024	
				Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra	PK
1	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi	13	13	13	19	13	18
2	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi	10	10	10	10	10	10
3	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	Rekomendasi	-	-	15	15	17	21
4	Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat	A	A	A	A	A	A
5	Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	95,13

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Terdapat perbedaan antara target indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam renstra dan target pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan pada renstra sebesar 13, sedangkan pada perjanjian kinerja sebesar 18, hal ini disebabkan oleh target pada

perjanjian kinerja menyesuaikan target kinerja anggaran yang menyesuaikan dengan hasil reviu renstra dimana kemudian target perjanjian kinerja disamakan dengan target yang tertera pada DIPA PSKP.

Indikator Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis pada perjanjian kinerja tahun 2024 targetnya ditingkatkan dari renstra yang sudah disusun karena capaian pada tahun 2023 sudah mencapai angka 23 sehingga dari hasil pembahasan revisi renstra perlu ditingkatkan.

Selain daripada itu, target kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berbeda dengan renstra karena capaian pada tahun 2023 sudah jauh melebihi renstra di angka 95,13 sehingga target perjanjian kinerja tahun 2024 dinaikkan sesuai dengan capaian tahun 2023 agar capaian tahun 2024 juga meningkat tidak turun dari tahun 2023.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja awal dan revisi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2024. Perubahan yang terjadi adalah pada besar total anggaran PSKP dimana sebagian sisa anggaran di Gaji dan Tunjangan dimana dialihkan ke Direktorat Jenderal Vokasi.

Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Revisi
[1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	18	18
[1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	10
[1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	21	21
[2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	95.13	95.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp 17.145.118.000	Rp 14.566.989.000
2	6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp 33.676.804.000	Rp 33.676.804.000
Total Anggaran			Rp 50.821.922.000	Rp 48.243.793.000

Pada tahun 2024, PSKP melakukan penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan anggaran belanja pegawai dan munculnya kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan pada Direktorat Jenderal Vokasi. Penyesuaian alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 2.578.129.000 menyebabkan adanya perubahan Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 50.821.922.000 menjadi Rp. 48.243.793.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi Capaian
1	[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	100%
2	[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	10	11	110%
3	[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	Rekomendasi Kebijakan	21	23	110%
4	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat	A	AA	101%
5	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai	95.13	98.99	104%

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024

SK.1 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

Rekomendasi kebijakan meliputi hasil pengembangan dan evaluasi standar di bidang pendidikan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, serta evaluasi sistem pendidikan. Rekomendasi kebijakan yang relevan merupakan rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dari kebijakan yang sedang berjalan atau isu-isu pendidikan yang sedang muncul. Sedangkan, rekomendasi kebijakan yang berkualitas adalah rekomendasi kebijakan yang bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi. Akan tetapi, merupakan rekomendasi kebijakan yang berbobot dan berdampak terutama untuk memperbaiki kebijakan yang sedang berjalan atau masalah yang sedang terjadi yang disusun secara kritis, analitis dan terstruktur.

Beberapa program utama untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama Pusat Standar dan kebijakan pendidikan, tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan evaluasi Standar di bidang Pendidikan;
2. Kajian kebijakan terkait penguatan pembelajaran, percepatan transformasi dan penguatan tata kelola Pendidikan;
3. Monitoring dan evaluasi program prioritas Kemendikbudristek diantaranya Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Kurikulum Merdeka;
4. Pengembangan indikator rapor pendidikan;
5. Analisis pemetaan mutu pendidikan;
6. Evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan;

Sasaran kegiatan pertama Pusat Standar dan kebijakan pendidikan memiliki 3 IKK.

Sasaran Kegiatan #1: Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan		
IKK #1.1: Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	IKK #1.2: Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	IKK#1.3: Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis

Ketiga IKK yang diemban PSKP telah mencapai 100% atau sesuai dengan target dan 2 diantara 3 IKK mencapai lebih dari 100%.

IKK 1.1 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses melakukan kajian dan/atau analisis terhadap masalah/isu pendidikan serta evaluasi terhadap kebijakan di bidang pendidikan yang hasilnya dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

IKK #1.1 diukur dengan menghitung jumlah hasil analisis kebijakan yang sudah diselesaikan sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2024.

Capaian jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran	IKK	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
					Target PK	Capaian	% Capaian PK		
Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	21	22	18	18	100%	18	100%

Capaian Tahun 2024 mencapai target Perjanjian Kinerja.

Tahun Berjalan	2022	2023	2024
Target Renstra	13	13	13
Capaian	21	23	18
Presentase	161%	169%	138%

Jika dibandingkan dengan Target Renstra, maka Capaian Tahun 2024 ini cukup tinggi di atas Target Renstra. Untuk pencapaian dari tahun ke tahun, dapat dilihat jika capaian IKK ini dapat terus mencapai capaian jauh di atas target dari yang sudah ditargetkan di Renstra.

Daftar judul kegiatan yang menghasilkan rekomendasi untuk pencapaian Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kajian Renstra Kemendikbudristek 2025-2029

Untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis 2025-2029, Kemendikbudristek melalui PSKP menyusun laporan studi cepat berjudul *Mewujudkan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa: Transformasi Sistem*

Pendidikan Indonesia, 2019-2024. Studi ini mengungkapkan tantangan pendidikan yang selama ini Indonesia hadapi berupa ketertinggalan dan kesenjangan pembelajaran. Akar masalah dari tantangan ini di antaranya penerapan kurikulum yang memuat terlalu banyak materi sehingga menimbulkan beban berlebihan pada peserta didik, masih kurang memadainya kompetensi pendidik dan lemahnya kepemimpinan instruksional kepala satuan pendidikan, masih tingginya tingkat perundungan di satuan pendidikan, evaluasi sistem pendidikan yang masih tumpang tindih, serta perlunya peningkatan kerja sama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Guna menanggulangi berbagai tantangan tersebut, Kemendikbudristek melakukan transformasi sistem pendidikan nasional dan diantaranya empat intervensi utama yang dilakukan ialah penguatan kepala satuan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, penyederhanaan kurikulum, dan perbaikan sistem evaluasi sistem pendidikan nasional. Selain itu untuk mengakselerasi upaya tersebut, Kemendikbudristek mendorong pemanfaatan teknologi digital melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Kemendikbudristek juga memperluas kerja sama dengan berbagai mitra pembangunan dan melakukan pendekatan konsultatif dan asimetris bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan.

2. Evaluasi Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka

Dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, aman, dan menyenangkan, Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan studi dampak Kurikulum Merdeka. Studi berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka dan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik ini menganalisis perubahan kualitas hasil belajar satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berdasarkan capaian Asesmen Nasional (AN) literasi dan numerasi sebelum penerapan kurikulum (AN 2021) dan sesudah penerapannya (AN 2023). studi ini mengungkapkan tiga temuan penting, yakni peningkatan hasil belajar literasi dan numerasi secara konsisten lebih tinggi pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dibandingkan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka mendorong resiliensi satuan pendidikan dari kelompok yang rentan mengalami ketertinggalan belajar, dan Kurikulum Merdeka membantu mengatasi kesenjangan hasil belajar antarsatuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

3. Kajian Perhitungan Unit Cost Standar Biaya

Untuk mendukung optimalisasi penerapan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) guna terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan, Kemendikbudristek melalui PSKP melaksanakan studi mendalam. Studi mendalam ini bertujuan untuk menghitung biaya satuan operasional nonpersonalia pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Studi ini juga bertujuan untuk menyediakan data yang lebih akurat sebagai dasar bagi pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran dan kebijakan yang lebih efisien.

Pendekatan campuran, pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam studi ini. metode pengumpulan data dalam studi ini menggunakan kuesioner semi-tertutup dan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Selanjutnya, studi ini menggunakan analisis biaya dengan membandingkan biaya yang diperlukan dengan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) di masing-masing daerah.

Studi ini menunjukkan bahwa biaya operasional nonpersonalia di setiap jenjang pendidikan di Indonesia memiliki variasi yang cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lokasi, karakteristik daerah, dan jenis satuan pendidikan. Selain itu, biaya operasional per peserta didik per tahun menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Studi ini juga menemukan korelasi yang signifikan antara biaya operasional dan IBP di tiap daerah.

4. Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan pada Program SMK PK

Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan Program SMK Pusat Keunggulan merupakan laporan hasil studi etnografi tahun kedua (*midline*) pada satuan pendidikan pelaksana program tersebut tahun 2023. Laporan ini merangkum hasil studi di sepuluh (10) lokasi pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat daerah. Laporan ini mengungkapkan terjadinya peningkatan kerja sama antara satuan pendidikan yang menjadi sampel dengan industri, peningkatan kompetensi SDM satuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Laporan ini juga mengungkapkan tantangan yang masih perlu dihadapi satuan pendidikan yang menjadi sampel. Sebagai contoh, tantangan terkait strategi penyerapan lulusan SMK. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah lulusan SMK yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja tiap tahun. Selain itu, belum semua dinas pendidikan di lokasi studi menunjukkan komitmen dan dukungan bagi pelaksanaan program.

5. Tinjauan Bukti: Program Sekolah Penggerak

PSKP berkolaborasi dengan IDinsight menerbitkan Tinjauan Bukti: Program Sekolah Penggerak yang bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi kemajuan positif dan peluang peningkatan implementasi untuk Program Sekolah Penggerak. Temuan dalam tinjauan ini juga menekankan peran signifikan kepala satuan pendidikan dalam mentransformasi satuan pendidikan dan pentingnya untuk terus membekali mereka terkait kepemimpinan instruksional. Selain itu, pemanfaatan Rapor Pendidikan juga mendukung dan berpotensi meningkatkan akuntabilitas perencanaan transformasi satuan pendidikan.

Tinjauan ini juga menemukan adanya pergeseran perilaku yang positif dari kepala satuan pendidikan dan pendidik berupa kolaborasi dalam pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Skema pengimbasan berupa pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar guru yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak selaras dengan praktik baik di tingkat global. Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah untuk Sekolah Penggerak telah meningkat, namun belum merata. Tinjauan ini menawarkan rekomendasi untuk implementasi dan studi yang lebih berkelanjutan.

6. Tinjauan Bukti: Implementasi Kurikulum Merdeka

PSKP berkolaborasi dengan IDinsight menerbitkan *Tinjauan Bukti: Implementasi Kurikulum Merdeka* yang bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi kemajuan positif dan peluang peningkatan implementasi Kurikulum Merdeka. Tinjauan ini menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menguntungkan bagi para pendidik yang memiliki motivasi dan kemampuan mumpuni. Sedangkan, bagi para pendidik selain kategori tersebut menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka cukup menantang. Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan aktivasi komunitas belajar dapat mendorong pengembangan kapasitas berkelanjutan. Namun, program pelatihan yang terstruktur masih perlu dibutuhkan.

Implementasi Kurikulum Merdeka menekankan proses kolaboratif dalam desain kurikulum antara kepala satuan pendidikan dan para pendidik. Studi global menunjukkan bahwa kolaborasi mendorong peningkatan rasa memiliki (*ownership*) para pendidik terhadap kurikulum dan membantu mengurangi beban administratif dalam perencanaan kurikulum. Di sisi lain, prinsip pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan peserta didik berpengaruh positif terhadap keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Namun, implementasi yang selaras dengan prinsip-prinsip inti masih perlu ditingkatkan. Sementara, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) berpotensi besar dalam mendorong transformasi

pembelajaran, namun pelatihan dan dukungan substansial sangatlah dibutuhkan dalam penerapannya.

7. Peta Jalan Pendidikan

Untuk mendukung Peta Jalan Pendidikan dan sebagai upaya dalam menjamin mutu pendidikan Indonesia, Kemendikbudristek melalui PSKP melaksanakan strategi transformasi salah satunya melalui Rapor Pendidikan. Pemanfaatan Rapor Pendidikan harapannya dapat mendorong daerah dan satuan pendidikan mengoptimalkan perbaikan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik

8. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan

Dalam upaya memastikan penjaminan mutu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas, Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program PAUD. Untuk memperoleh gambaran dari ketiga hal tersebut, studi ini selanjutnya mengkaji capaian Sulingjar PAUD tahun 2023, membandingkan capaian hasil Sulingjar PAUD berdasarkan status akreditasi tahun 2023, dan mengidentifikasi keselarasan hasil Sulingjar PAUD dan hasil akreditasi tahun 2023. Studi ini menggunakan data 44.797 satuan PAUD yang di akreditasi dan secara beririsan satuan tersebut juga mengikuti Sulingjar 2023 dengan status memadai. Metode deskriptif melalui bagan dan grafik digunakan dalam studi ini.

9. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan

Evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan tertuang dalam risalah kebijakan berjudul Meningkatkan Pemanfaatan Data Rapor Pendidikan untuk Perencanaan yang Lebih Efektif di Satuan Pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk menelaah pemanfaatan Rapor Pendidikan pada tahun 2023.

Evaluasi dilakukan melalui survei kepada 10.514 satuan pendidikan serta wawancara kepada kepala satuan pendidikan dan pendidik di 114 satuan pendidikan. Secara lebih rinci, wawancara dilakukan di delapan (8) kabupaten/kota untuk satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, delapan (8) provinsi untuk jenjang SMK dan SLB, serta 30 provinsi untuk jenjang SMA. PSKP mengambil dua satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMK, dan SMA serta satu satuan pendidikan jenjang SLB di setiap lokasi.

Risalah ini menemukan bahwa akses, upaya, dan dukungan untuk memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber data perencanaan sudah relatif baik; pemahaman terhadap Rapor Pendidikan dan perencanaan

berbasisi data (PBD) belum utuh sehingga upaya perbaikan yang mulai dilakukan dikhawatirkan belum sepenuhnya sesuai dengan akar masalah; dan data Rapor Pendidikan belum seutuhnya dianggap sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

10. Pengelolaan Rapor Pendidikan

Untuk menjaga keberlanjutan dan mendukung pelaksanaan evaluasi sistem pendidikan, Kemendikbudristek bersama Kementerian Dalam Negeri menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan. Indikator ini ditetapkan dan diatur di dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 018/H/M/2024 tentang Indikator Rapor Satuan Pendidikan dan Rapor Pendidikan Daerah Tahun 2024. Indikator selanjutnya ini menjadi dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Indikator ini meliputi aspek Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi hingga Iklim Keamanan dan Iklim Inklusivitas. Melalui indikator ini, Kemendikbudristek berharap dapat membantu daerah dalam mengoptimalkan layanan pendidikannya.

11. Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar

Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan studi mendalam terkait implementasi Program Indonesia Pintar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren variasi antardaerah terkait akses pendidikan (APK, APS, dan APM), angka melanjutkan, dan angka putus sekolah, serta dampak PIP terhadap akses pendidikan, menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam penyerapan dana PIP dan strategi pencapaiannya, serta menganalisis bantuan sejenis PIP di daerah dan dampaknya bagi keberlanjutan pendidikan. Studi ini mengungkapkan bahwa PIP terbukti dapat menurunkan tingkat putus sekolah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa PIP mengakselerasi akses pendidikan dilihat dari APS dan APK yang lebih tinggi dengan intervensi PIP. Studi ini juga menunjukkan implementasi PIP yang baik di daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk menginisiasi program yang serupa dengan PIP.

12. Evaluasi Pembudayaan Literasi/Baseline

Studi ini merupakan *baseline* untuk menyoroti tantangan pembudayaan dan capaian skor literasi peserta didik di Indonesia. Studi ini juga mengungkapkan berbagai upaya yang Kemendikbudristek lakukan untuk menanggulangi tantangan tersebut.

13. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Cepat) Analisis hasil-hasil Monev untuk Penguatan Narasi MB

Dalam upaya mengamplifikasi praktik baik kebijakan Merdeka Belajar dan berbagai upaya transformasi holistik untuk pendidikan Indonesia, PSKP melaksanakan analisis melalui sepuluh episode siniar *Perspektif*. Sepuluh episode tersebut meliputi judul sebagai berikut:

- a. PPDB Beri Kesempatan Semua Anak Bisa Sekolah
- b. TeFa: Miniatur Dunia Kerja di SMK
- c. SMK Bisa! Kolaborasi dengan Dunia Kerja
- d. Bersama Pemda, Kurikulum Merdeka kian Menyala
- e. Merayakan Kebinekaan: Pesan Keberagaman dari Soppeng dan Salatiga
- f. Gotong Royong Wujudkan Sekolah yang Kita Cita-citakan
- g. Meniti Harapan, Menggapai Asa: PIP Wujudkan Mimpi Anak Indonesia
- h. Dengan Asesmen yang Tepat, Belajar Tak Lagi Menakutkan
- i. Menjadi Guru yang Dirindu Kisah Para Pejuang Pembelajar dari Hulu Sungai Tengah
- j. Sekolah Kaya Teks Tingkatkan Minat Baca di Daerah Terpencil.

Secara khusus, PSKP berharap siniar tersebut dapat menjadi media advokasi publik dalam memperkuat pemahaman terkait standar pendidikan, menggaungkan berbagai analisis kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh PSKP, menginspirasi, mengedukasi, memperluas praktik baik berbagai kebijakan Merdeka Belajar, serta mendorong aksi nyata peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua.

14. Evaluasi Program Makan Siang Bergizi

Untuk mendukung penerapan kebijakan Program Makan Siang Bergizi Gratis, Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan studi terkait program tersebut. Studi ini bertujuan menggali secara komprehensif dan akurat terkait kondisi saat ini, kebutuhan, dan potensi dampak dari Program Makan Siang Bergizi pada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini dilakukan di enam provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Selanjutnya studi ini membahas program-program terkait makan bergizi di berbagai negara. Studi ini kemudian mengungkapkan berbagai praktik baik pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di daerah sampel.

15. Analisis Data Evaluasi Sistem Pendidikan

Evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan tertuang dalam risalah kebijakan berjudul *Meningkatkan Pemanfaatan Data Rapor Pendidikan untuk Perencanaan yang Lebih Efektif di Satuan Pendidikan*. Evaluasi ini bertujuan untuk menelaah pemanfaatan Rapor Pendidikan pada tahun 2023.

Evaluasi dilakukan melalui survei kepada 10.514 satuan pendidikan serta wawancara kepada kepala satuan pendidikan dan pendidik di 114 satuan pendidikan. Secara lebih rinci, wawancara dilakukan di delapan (8) kabupaten/kota untuk satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, delapan (8) provinsi untuk jenjang SMK dan SLB, serta 30 provinsi untuk jenjang SMA. PSKP mengambil dua satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMK, dan SMA serta satu satuan pendidikan jenjang SLB di setiap lokasi.

Risalah ini menemukan bahwa akses, upaya, dan dukungan untuk memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber data perencanaan sudah relatif baik; pemahaman terhadap Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data (PBD) belum utuh sehingga upaya perbaikan yang mulai dilakukan dikhawatirkan belum sepenuhnya sesuai dengan akar masalah; dan data Rapor Pendidikan belum seutuhnya dianggap sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

16. Studi Cepat - Kajian Pendidikan Nonformal sebagai Solusi Anak Tidak Sekolah (ATS)

Kemendikbudristek melalui PSKP bermitra dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) melakukan studi terkait pendidikan nonformal sebagai solusi anak-anak tidak sekolah (ATS) atau *out of school children*. Studi ini selanjutnya didokumentasikan dalam *briefing note* berjudul *Studi Pendidikan Non-Formal sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah di Indonesia, termasuk dalam Konteks Pandemi COVID-19*. Melalui studi ini, PSKP mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan nonformal serta mengembangkan rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas, kualitas, dan relevansi layanan pendidikan nonformal atau pendidikan kesetaraan.

Studi ini dilakukan dengan metode studi literatur dan pendekatan kualitatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, desa, serta institusi layanan pendidikan nonformal. Sejumlah perwakilan pemangku kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten berpartisipasi dalam studi ini. Sejumlah 20 lembaga pendidikan nonformal (18 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 2 sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) di Kabupaten Bone,

Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menjadi informan untuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dalam studi ini. Temuan dalam studi ini berkaitan dengan tata kelola dan manajemen, monitoring dan supervisi, sumber daya manusia, kurikulum dan pembelajaran, gender dan inklusi, persepsi terkait layanan pendidikan nonformal, serta dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal.

17. Evaluasi Kurikulum Merdeka

Dalam mendukung implementasi kebijakan kurikulum dan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan inklusif, Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan kajian implementasi Kurikulum Merdeka. Studi ini bertujuan untuk memahami perkembangan implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, mengumpulkan praktik baik penerapan kurikulum dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong praktik baik tersebut, mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasi, mengidentifikasi kesiapan dan upaya daerah dalam mengoptimalkan penerapan Kurikulum Merdeka, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Studi ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, metode survei secara daring atau telepon dipilih untuk mengumpulkan data gambaran umum pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Untuk memperkaya studi, wawancara dan observasi juga dilakukan di delapan (8) daerah.

Studi ini mengungkapkan bahwa adaptasi terhadap Kurikulum Merdeka telah mendorong perbaikan kualitas pembelajaran dan implementasi Kurikulum Merdeka memperluas ruang belajar mandiri para pendidik. Namun, sebagian besar satuan pendidikan masih mengalami tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri. Tantangan dalam implementasi tersebut terjadi baik dalam proses mempelajari kurikulum maupun dalam proses melaksanakannya pada pembelajaran.

18. Evaluasi Pembudayaan Literasi

Kemendikbudristek melalui PSKP menerbitkan hasil studi berupa laporan studi dan risalah kebijakan terkait pembudayaan literasi. Laporan berjudul *Kebijakan Literasi Sudahkah Sesuai Ekspektasi? Kajian Evaluasi Dampak Program Hibah Buku Bacaan Bermutu* dan risalah berjudul *Mengatasi Tantangan Sekolah-Sekolah dengan Tingkat Literasi Rendah* harapannya dapat berkontribusi dan mendukung berbagai upaya transformatif Kemendikbudristek dalam meningkatkan kemampuan literasi seluruh peserta didik di Indonesia. Studi ini menyoroti tantangan pembudayaan

dan capaian skor literasi peserta didik di Indonesia. Studi ini juga mengungkapkan berbagai upaya yang Kemendikbudristek lakukan untuk menanggulangi tantangan tersebut.

Setelah kajian yang lebih mendalam ditemukan bahwa umumnya sarana penunjang literasi telah tersedia di satuan pendidikan, seperti perpustakaan dan pojok baca/sudut baca. Namun, pengelolaan sarana tersebut belum berjalan optimal dan tidak dilengkapi koleksi buku yang memadai. Studi ini juga menemukan bahwa kepemimpinan kepala satuan pendidikan belum mengarah pada penguatan literasi. Kompetensi para pendidik untuk mendukung peningkatan literasi peserta didik juga masih terbatas. Namun, praktik belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan komunitas belajar mulai berkembang. Selain itu, keterbatasan program penguatan literasi dan akses terhadap buku bacaan menghambat upaya pembentukan kebiasaan membaca peserta didik. Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah juga masih terbatas. Padahal, penguatan literasi peserta didik bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, melainkan juga pemerintah daerah.

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Koordinasi dan kerja sama antar unit utama/satuan kerja teknis yang baik.
- Kerjasama yang baik antar anggota tim penyusun rekomendasi kebijakan.
- Pengalaman yang cukup dari masing-masing anggota tim penyusun rekomendasi kebijakan.
- Dukungan yang sangat baik dari para dewan pembina.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

- Kendala pada jaringan saat melaksanakan validasi data di daerah.
- Terdapat penambahan ruang lingkup dalam evaluasi SMK PK untuk memperdalam mengenai kesenjangan literasi dan numerasi antara SMA dan SMK.
- Kebutuhan data pendukung untuk analisis yang tidak dimiliki oleh PSKP.

- Data AN perlu analisis lebih lanjut sebelum bisa untuk digunakan.
- Ketidaksesuaian jadwal dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan intervensi dan jadwal monev
- Jumlah SDM belum memadai dan perlunya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM
- Tahapan kegiatan tidak maksimal dilaksanakan karena ada kebijakan penghematan anggaran

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

- Menggunakan koneksi internet staf untuk hotspot siswa dalam melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer secara daring.
- Membekali data Rapor Pendidikan terkait capaian literasi dan numerasi di satdik sasaran, dan memberikan prosedur tambahan kepada peneliti lapangan untuk memperdalam pengamatan terkait literasi dan numerasi
- Koordinasi dengan pihak terkait pemilik data untuk pemenuhan data pendukung tersebut.
- Proses simulasi analisa dilakukan berulang kali dengan cara yang berbeda.
- Penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan intervensi dan jadwal monev.
- Sharing SDM antar tim dan rekrutmen peneliti lapangan, dan Fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang analisis data serta penyusunan rekomendasi dan publikasi kebijakan.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan prioritas kajian dan alternatif lain seperti rapat dalam kantor.

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan ini. Strategi-strategi tersebut adalah:

- Melakukan komunikasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan unit terkait.
- Pelibatan Direktorat Teknis terkait dalam penyusunan rekomendasi dan berkomunikasi secara intensif dengan pimpinan pada proses penyusunan rekomendasi.
- Berkolaborasi dengan organisasi mitra Kemdikbudristek untuk mendapatkan dukungan tenaga ahli dalam proses penyusunan rekomendasi.

Capaian IKK Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan ini kami anggap sebagai suatu keberhasilan karena sudah mencapai target yang kami buat di awal tahun, walaupun tidak melebihi target.

IKK. 1.2 Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Standar di bidang pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem atau komponen tertentu dari sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar di bidang pendidikan dapat berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun standar di bidang pendidikan yang lain di luar SNP.

SNP mencakup:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian Pendidikan;
- e. Standar Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Standar di bidang pendidikan yang lain di luar SNP, antara lain:

- a. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan;
- b. Standar Pembelajaran Jarak Jauh;
- c. dan lain-lain.

Rekomendasi standar merupakan hasil pengembangan standar maupun hasil evaluasi terhadap suatu standar yang dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

IKK #1.2 ini dihitung dengan menghitung jumlah hasil rekomendasi standar yang sudah diselesaikan sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2024.

Capaian jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran	IKK	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
					Target PK	Capaian	% Capaian PK		
Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	10	11	10	11	110%	11	110%

Capaian Tahun 2024 tidak jauh melebihi dari Target Perjanjian Kinerja. Adanya kebutuhan untuk evaluasi standar diluar yang sudah direncanakan dan adanya penambahan anggaran yang diakibatkan dari pembukaan blokir yang kemudian diarahkan untuk membiayai evaluasi standar tersebut.

Tahun Berjalan	2022	2023	2024
Target Renstra	10	10	10
Capaian	10	11	11
Presentase	100%	110%	110%

Jika dibandingkan dengan Target Renstra maka Capaian Tahun 2024 ini berada di atas Target Renstra. Untuk pencapaian dari tahun-ke tahun, dapat dilihat jika capaian IKK ini dapat terus mencapai capaian diatas target dari yang sudah ditargetkan di Renstra.

Daftar judul kegiatan yang menghasilkan rekomendasi untuk pencapaian Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kajian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Kemendikbudristek melalui PSKP mengevaluasi regulasi terkait pendidikan jarak jauh serta menyusun kajian yang terkait. Kajian ini menjadi dasar atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal yang mendasari kajian ini di antaranya adalah karena munculnya ketimpangan antara regulasi terkait PJJ dengan implementasi di lapangan, perlunya penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini, minimnya pelaksanaan penjaminan mutu PJJ, jumlah PJJ yang

meningkat, dan untuk mendukung terwujudnya peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas secara merata dan terjangkau.

PSKP melakukan kajian di tujuh (7) daerah, di antaranya Kota Surabaya (Surabaya Utara, Barat, Selatan, dan Timur), Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Garut. Pengumpulan dan analisis data kajian menggunakan metode campuran dengan menitikberatkan pada metode kualitatif (*concurrent embedded design*). Keluaran dari kajian ini berupa risalah kebijakan untuk dilaporkan kepada pimpinan dan unit yang terkait. Dalam menyusun kajian tersebut secara komprehensif, PSKP bekerja sama dan menerima masukan dari SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), para akademisi, dinas pendidikan, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, dan komunitas.

2. Pengembangan Standar Pendidik

Standar pendidik merupakan salah satu standar dalam delapan (8) Standar Nasional Pendidikan. Untuk mendukung pemenuhan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan dan pengembangan standar pendidikan yang relevan dengan perundang-undangan dan kebijakan terkini, Kemendikbudristek melalui PSKP menyusun rekomendasi revisi standar pendidik. Dalam menyusun rekomendasi tersebut secara komprehensif, PSKP mengundang dan menerima masukan dari para akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, dan komunitas. Beberapa isu menjadi bahan diskusi, terutama isu terkait PAUD, widyaiswara, konselor, dan peraturan peralihan. Hasil diskusi ini menjadi dasar dalam penyusunan draf Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta risalah kebijakan berjudul *Adaptasi Standar Pendidik sebagai Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia*.

3. Pengembangan Standar Tenaga Pendidik

Dalam mendukung penyusunan draf Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, PSKP juga menyusun naskah urgensi untuk draf rancangan tersebut. Naskah ini terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta tujuan dari reviu terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan. Naskah ini juga mengidentifikasi isu dan usulan serta membandingkan kualifikasi dan kompetensi pendidik pada regulasi-regulasi terkait, seperti: Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru; Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; Permendikbud No 34 Tahun 2018 Tentang

Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK; Permendiknas No.32 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus; dan Permendikbud No 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.

4. Rekomendasi Regulasi Pengelolaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik dengan Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa (PKBI)

Kemendikbudristek melalui PSKP terus berupaya untuk menghadirkan pendidikan bermutu yang merata dan inklusif salah satunya melalui penyusunan rekomendasi regulasi pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa (PKBI). Dalam rekomendasi tersebut, PSKP menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan Naskah Urgensi terkait PKBI. RPM terkait PKBI bertujuan untuk melindungi hak individu, memastikan akses kesetaraan, mendorong pengembangan kompetensi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan. Dengan demikian, para peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat memperoleh kesempatan akses yang setara terhadap pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perlakuan yang adil, dan dukungan yang memadai. RPM ini mengatur hal-hal seperti definisi, pengelolaan penyelenggaraan, kurikulum, pendidik dan tenaga ahli, sarana dan prasarana, pendanaan, kerja sama dan peran serta masyarakat, dan lainnya.

5. Pengembangan Kerangka Sekolah Berkualitas

Secara umum, studi yang bertujuan untuk merumuskan kerangka pengembangan sekolah yang berkualitas. Kerangka ini meliputi dimensi, indikator, dan gradasi (penahapan) pada tingkat satuan pendidikan. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk mensintesis kerangka pengembangan sekolah yang berkualitas dari sejumlah negara, menganalisis dimensi dan indikator kerangka sekolah yang kita cita-citakan, merumuskan komponen dari setiap gradasi capaian sekolah yang berkualitas, melakukan validasi komponen tersebut, serta merumuskan implikasi bagi satuan pendidikan dari sisi dimensi, indikator, dan komponen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, verifikasi, dan validasi lapangan.

6. Petunjuk Teknis Rombongan Belajar (Rombel)

Petunjuk teknis pembentukan rombongan belajar merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menerapkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)

Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Selain itu, penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk memastikan hak setiap peserta didik dalam memperoleh proses pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan, memberikan panduan penentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan, dan memberikan panduan penentuan toleransi daya tampung peserta didik per rombongan belajar di satuan pendidikan dalam kondisi yang dikecualikan. Kondisi yang dikecualikan ini di antaranya apabila terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses peserta didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidikan pada satuan pendidikan serta kondisi untuk satuan pendidikan yang baru didirikan, menyelenggarakan kelas rangkap, dan/atau satuan pendidikan yang berada di daerah khusus.

7. Penyusunan Desain Evaluasi BOP PAUD

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) merupakan bantuan biaya nonpersonalia untuk meringankan beban biaya orang tua serta meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan BOP PAUD, PSKP melaksanakan kajian terkait BOP PAUD. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian data peserta didik secara keseluruhan dan mensinkronisasikan data peserta didik pada Dapodik dan BOP PAUD, menganalisis efektifitas perencanaan dan realisasi BOP PAUD, menganalisis pemanfaatan BOP PAUD berdasarkan petunjuk teknis BOP PAUD, menganalisis hubungan BOP PAUD dengan akses dan mutu pembelajaran, mengidentifikasi hambatan dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, serta sebagai upaya perbaikan kebijakan pengelolaan dana BOP PAUD. Kajian yang menggunakan pendekatan kombinasi (*mixed methods*) dengan desain Explanatory Sequential ini mengumpulkan data sejak Juli hingga Agustus 2024. Kota Padang, Kota Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kupang, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Makassar dipilih sebagai lokasi pengumpulan data.

8. Penyusunan Desain Evaluasi BOS Kinerja

Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan standar pembiayaan terkait kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) Kinerja Prestasi, PSKP menyusun draf risalah kebijakan dengan judul *Optimalisasi Pendanaan dalam Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan: Evaluasi Pada Kebijakan BOS Kinerja Prestasi*. Kebijakan BOS Kinerja Prestasi merupakan bantuan pendanaan sebagai apresiasi kepada berbagai satuan pendidikan yang telah melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui prestasi pada

ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

Melalui risalah ini, PSKP menemukan bahwa walaupun peningkatan prestasi terjadi pada berbagai satuan pendidikan yang menerima bantuan, namun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut di antaranya masih sempitnya dasar penetapan prestasi, kebutuhan yang berbeda antar jenjang pendidikan, kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan BOS Kinerja Prestasi, serta perlunya perbaikan arah pemanfaatan pembiayaan pada kebijakan program peningkatan prestasi dan pengimbasan. Risalah ini merekomendasikan agar melakukan perbaikan peraturan pada komponen pembiayaan program peningkatan prestasi satuan pendidikan, melakukan perbedaan pendanaan untuk satuan pendidikan prestasi, memperluas dasar prestasi satuan pendidikan penerima dana BOS Kinerja Prestasi, mendorong penguatan kebijakan oleh pemerintah daerah, serta melakukan optimalisasi untuk program pengimbasan.

9. Penyusunan Desain dan Pengumpulan Data Kajian Penyelarasan Nomenklatur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Kajian penyelarasan nomenklatur peserta didik berkebutuhan khusus merupakan kajian untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan bermutu yang inklusif. Kajian ini dapat menjadi data, instrumen, dan panduan dalam menyusun strategi dan intervensi yang lebih tepat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik disabilitas dan berkebutuhan khusus. Melalui kajian ini, Kemendikbudristek dapat mendorong akses yang lebih luas bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat belajar di satuan pendidikan arus utama.

Kajian ini juga mempertegas penyelarasan nomenklatur dan kategorisasi baku terkait peserta didik berkebutuhan khusus. Penyelarasan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi bagi kementerian/lembaga terkait lainnya. Dalam menyusun kajian ini secara komprehensif, PSKP melibatkan dan menerima masukan dari perwakilan akademisi, psikolog, Komisi Nasional Disabilitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), satuan pendidikan, dan komunitas.

10. Evaluasi Sertifikasi Kompetensi SMK/Program Diksi

Dalam rangka memahami efektivitas implementasi dan dampak Program Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi (Banpem Serkom) SMK, Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan studi terhadap program

tersebut. Studi ini secara khusus berfokus pada pelaksanaan banpem di tahun 2023, menimbang banpem tahun 2024 belum sepenuhnya selesai diimplementasikan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas proses dan implementasi program sertifikasi kompetensi di tingkat pelaksana satuan pendidikan, mengidentifikasi dampak sertifikasi kompetensi terhadap kualitas lulusan SMK dan tingkat kebugaran lulusan dunia kerja, serta mengidentifikasi efektivitas proses dan implementasi program di tingkat pelaksana pusat.

Studi ini memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta metode evaluasi *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) untuk menggali secara holistik terkait implementasi Program Serkom dan dampaknya terhadap kualitas lulusan. Studi ini mengungkapkan bahwa pada umumnya penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan konsentrasi keahlian. Namun, analisis kebutuhan yang sistematis belum dilakukan sebagian besar satuan pendidikan. Studi ini juga menemukan kendala yang dihadapi oleh guru asesor, kesenjangan sarana dan prasarana di daerah di luar Pulau Jawa, keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) masih terbatas pada sinkronisasi kurikulum, dinamika ketepatan waktu penyaluran bantuan, industri kecil dan menengah masih kurang memahami pentingnya sertifikat kompetensi, serta sertifikasi berlogo Garuda belum menjadi faktor utama yang memengaruhi besaran gaji. Selain itu, studi ini menemukan bahwa proses seleksi banpem telah dilakukan dengan transparan dan sebanyak 53% alumni yang bekerja melaporkan bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki.

11. Evaluasi Standar Nasional Pendidikan

Untuk mendukung optimalisasi penerapan Standar Nasional Pendidikan, Kemendikbudristek melalui PSKP melakukan evaluasi dan sosialisasi terkait SNP. Dari delapan SNP, PSKP melakukan sosialisasi untuk tujuh SNP, yakni Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022); Standar Isi (Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024); Standar Proses (Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022); Standar Penilaian Pendidikan (Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022); Standar Sarana dan Prasarana (Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023); Standar Pembiayaan (Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023); dan Standar Pengelolaan (Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) tidak menjadi ateri sosialisasi karena sedang dalam proses revisi perundangan.

Melalui kegiatan ini, PSKP mengamplifikasi informasi tentang regulasi SNP kepada para pemangku kepentingan di daerah, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait regulasi SNP, serta menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan sosialisasi. PSKP mengevaluasi penerapan SNP melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi SNP dilaksanakan di lima lokasi, yaitu Kabupaten Serang, Kota Balikpapan, Kota Mataram, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Tabanan. Kriteria dalam pemilihan lokasi berdasarkan daerah yang memiliki jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta dengan akreditasi A dan B terbanyak.

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah

- Ketepatan pemilihan pemangku kepentingan dan narasumber ahli yang dapat memberikan masukan yang tepat dalam penyusunan maupun evaluasi standar di bidang pendidikan.
- Keterwakilan yang baik dari seluruh lapisan pihak-pihak yang terpengaruhi oleh adanya kebijakan standar di bidang pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

- Kesulitan dalam mencari narasumber dari Badan Akreditasi Nasional karena kesibukan dari anggota BAN.
- Kesulitan untuk menentukan NSPK landasan dalam menyusun upskilling dan reskilling guru SMK.
- Kebutuhan untuk bantuan konsultan dalam melaksanakan evaluasi standar
- Pada Kajian penghitungan unit cost standar biaya terdapat kebutuhan penambahan ruang lingkup kajian dari Ditjen Vokasi berupa 128 komponen keahlian di 16 lokasi.
- Pada Kajian School Excellent Framework, terdapat kendala kesulitan untuk mengakses literatur pada negara tertentu.
- Pada Penyusunan Juknis Rombel terdapat kendala berupa potensi dampak negatif dari juknis tersebut dengan kebijakan strategis yang lain.
- Adanya keterbatasan anggota BAN PDM yang ditugaskan sebagai penyusun SNP, dari 2 yang dimintakan hanya ditugaskan 1 anggota BAN PDM untuk setiap judul standar yang disusun.

- Terdapat perluasan ruang lingkup dalam penyusunan Standar Tendik yang dikarenakan luasnya definisi Tenaga Pendidik sehingga memerlukan lebih banyak perwakilan dari pemangku kepentingan.
- Kurangnya jumlah SDM internal dalam penyusunan standar.
- Belum memadainya upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan standar agar relevan dengan isu/substansi/regulasi standar terkini.
- Ketidaksesuaian jadwal antara SDM eksternal dengan tim penyusun.
- Dalam proses penyusunan standar terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan sering kali tidak dapat ditangani oleh tim sehingga berujung pada kebuntuan.

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

- Berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional untuk menyamakan jadwal.
- Menggunakan Permendikbud no 34 Tahun 2018 sebagai landasan Upskilling dan Reskilling guru SMK.
- Menggunakan jasa konsultan yang disewa untuk membantu proses evaluasi standar.
- Bekerjasama berbagi sumberdaya dengan Ditjen Vokasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Memanfaatkan data sekunder dan literatur yang telah dimiliki oleh Ditjen Paud Dasmen mengenai negara tersebut.
- Meng-eksksnlasi permasalahan tersebut ke Dewan Pengarah agar mendapatkan arahan yang sinergi dengan kebijakan-kebijakan yang lain.
- Tetap mengundang anggota BAN PDM tertentu yang dimungkinkan untuk berdiskusi bersama-sama.
- Melakukan optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelibatan stakeholder lain.
- Kolaborasi dengan SDM eksternal.
- Penambahan aktivitas peningkatan kapasitas SDM dalam isu/substansi/regulasi melalui pembinaan secara internal dan pelatihan/Bimtek/Seminar dengan melibatkan pihak eksternal.
- Penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal.

- Peningkatan kapasitas tim penyusun standar dalam mengelola aspirasi publik secara produktif melalui pembinaan secara internal dan pelatihan dengan melibatkan pihak eksternal.

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan ini. Strategi - strategi tersebut adalah:

- Melakukan pembahasan secara intensif dengan pemangku kepentingan dan narasumber ahli untuk mempersiapkan draf standar agar bisa segera diuji publikkan.
- Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam memfasilitasi penyusunan standar.

Capaian IKK Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan ini kami anggap sebagai suatu keberhasilan karena sudah mencapai dan melebihi target yang kami buat di awal tahun.

IKK 1.3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Strategis

Rekomendasi kebijakan meliputi hasil pengembangan dan evaluasi standar di bidang pendidikan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, serta evaluasi sistem pendidikan.

Kebijakan strategis adalah keputusan berupa peraturan atau Program Prioritas Kementerian dalam rangka melaksanakan rencana strategis Kementerian. Kebijakan strategis yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan pendidikan perlu didukung oleh hasil analisis kebijakan yang berkualitas, baik pada tahap perumusan dan/atau pelaksanaan, serta pada tahap evaluasi. Analisis kebijakan yang diselenggarakan diarahkan untuk mendukung kebijakan strategis Kementerian dan mendukung pembangunan pendidikan secara umum.

IKK #1.3 ini dihitung dengan menghitung jumlah hasil rekomendasi kebijakan standar yang sudah dijadikan sebagai dasar kebijakan strategis sejak Bulan Januari sampai Bulan Desember 2024.

Capaian jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran	IKK	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
					Target PK	Capaian	% Capaian PK		
Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	Rekomendasi Kebijakan	21	23	21	23	110%	23	110%

Capaian Tahun 2024 cukup jauh melebihi dari Target Perjanjian Kinerja. Upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan pendidikan untuk menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan dan evaluasi standar kepada pengampu kebijakan di lingkungan selama Tahun 2024 Kemendikbudristek menghasilkan capaian yang cukup tinggi diatas target perjanjian kinerja dan target renstra.

Tahun Berjalan	2022	2023	2024
Target Renstra	-	15	17
Capaian	-	23	23
Presentase	-	153%	135%

Daftar judul kegiatan yang menghasilkan rekomendasi untuk pencapaian jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi Kegiatan

1. Pengembangan Indikator Rapor Pendidikan (Pengelolaan Rapor Pendidikan) dimanfaatkan dalam Rapor
2. Pendidikan 2024 hasil analisis Rapor Pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan (RPJPN) 2025-2045 oleh Bappenas (persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimum)
3. Hasil analisis evaluasi pemanfaatan evaluasi sistem pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 oleh Bappenas
4. Hasil Analisis Kesenjangan Pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan laporan capaian SDG's 4 Indonesia di Perancis

5. Hasil Analisis Rapor Pendidikan digunakan dalam penghitungan indeks Standar Pelayanan Minimum oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
6. Hasil Analisis Rapor Pendidikan digunakan dalam Surat Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Hasil Analisis Evaluasi Dampak Program Organisasi Penggerak dimanfaatkan oleh Direktorat Guru Dikdas dan Direktorat Guru PAUD Dikmas sebagai laporan capaian Program Organisasi Penggerak
8. Hasil analisis modul evaluasi asesmen nasional (Persiapan, Tantangan, dan resiko) dimanfaatkan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Skala Nasional 2024 oleh Pusat Asesmen Pendidikan bersama 34 Dinas Pendidikan Provinsi
9. Evaluasi Pembudayaan Literasi sudah disampaikan kepada Badan Bahasa sebagai bahan pengajuan pembiayaan tahun berikutnya (2025)
10. Evaluasi Pembudayaan Literasi sudah disampaikan kepada POKJA PDM 10 dalam perbaikan program pelatihan dan pendampingan tahun berikutnya (2025)
11. Rekomendasi Proses Bisnis Pengembangan Rapor Pendidikan sudah digunakan dalam Kepmen Proses Bisnis Kemendikbudristek Tahun 2024 (nomor menyusul)
12. Hasil kajian PPDB digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
13. Hasil kajian Monitoring dan evaluasi pemanfaatan rapor pendidikan digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
14. Hasil kajian evaluasi implementasi kurikulum merdeka digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
15. Hasil kajian akademik penyusunan draft RPM PDPKBI (peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa) digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
16. Hasil kajian Renstra digunakan oleh biro perencanaan untuk digunakan sebagai landasan menyusun renstra kemendikdasmen 2025 - 2029

17. Laporan evaluasi implementasi kurikulum merdeka menjadi bahan laporan perkembangan implementasi kurikulum nasional kepada menteri

b. Rekomendasi Standar

1. Pengembangan Standar Pendidik dimanfaatkan pada draft Permendikbudristek tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Pengembangan Standar Pendidik lainnya dimanfaatkan pada draft Permendikbudristek tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Rombongan Belajar ditetapkan melalui SK Kepala BSKAP dan menjadi rujukan oleh POKJA PDM 08 Ditjen PDM dalam menyusun Panduan penyelenggaraan kelas rangkap.
4. Rekomendasi kajian Unit Cost dimanfaatkan direktorat SMK sebagai dasar penyusunan Draft Juknis BOS Majemuk pada tingkat program keahlian.
5. Rekomendasi kajian BOP PAUD dimanfaatkan direktorat PAUD sebagai bahan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan ARKAS bagi penyelenggara satuan PAUD
6. Rekomendasi kajian PIP dimanfaatkan oleh PUSLAPDIK dalam mengoptimalkan pengelolaan PIP oleh pemerintah daerah

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah

- Advokasi rekomendasi kebijakan yang baik dengan unit utama/satuan kerja teknis.
- Advokasi rekomendasi kebijakan menggunakan media sosial sehingga lebih luas jangkauannya.
- Sinergi rekomendasi kebijakan dengan regulasi lainnya.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

- Masih terdapat miskonsepsi terhadap rekomendasi kebijakan.
- Fokus saat pelaksanaan kegiatan sampai pertengahan tahun ini masih kepada pencapaian output, belum kepada advokasi/sosialisasi rekomendasi kebijakan dan standar.

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

- Melakukan FGD pada masing - masing ketua tim untuk menggali tema advokasi yang tepat.
- Proses advokasi/sosialisasi rekomendasi kebijakan dan standar akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis ini. Strategi - strategi tersebut adalah:

- Berkoordinasi dengan intensif dengan direktorat terkait sehingga dapat menyiapkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan strategis segera dimanfaatkan.
- Menyampaikan hasil rekomendasi kebijakan secara resmi kepada para pemangku kepentingan terkait

Capaian IKK Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis ini kami anggap sebagai suatu keberhasilan karena sudah mencapai dan melebihi target yang kami buat di awal tahun.

SK.2 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mencerminkan peningkatan dalam pengelolaan standar dan kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini melibatkan peningkatan koordinasi, implementasi, dan evaluasi terhadap standar-standar pendidikan nasional yang berlaku. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan memiliki peran krusial dalam memastikan konsistensi, relevansi, dan efektivitas kebijakan pendidikan. Peningkatan tata kelola ini dapat mencakup penyempurnaan standar pembelajaran, peningkatan penilaian kinerja sekolah, dan penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, peningkatan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berkontribusi pada upaya meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional.

Sasaran kegiatan kedua Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan memiliki 2 IKK.

Sasaran Kegiatan #2: Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	
IKK #2.1: Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	IKK #2.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Kedua IKK dibawah Sasaran Kegiatan #2 ini pada Tahun 2023 dapat mencapai 100%, dimana Tahun 2024 ini keduanya bisa dianggap melebihi 100% karena predikat SAKIP PSKP mencapai AA dimana diatas target yaitu A.

IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$



Capaian predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran	IKK	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
					Target PK	Capaian	% Capaian PK		
Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat	A	A	A	AA	100%	A	100%

Capaian predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun berjalan dapat mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya pada Renstra PSKP.

Capaian ini didapatkan dengan nilai akuntabilitas sebesar 90.90 meningkat dari tahun 2023 yaitu capaiannya sebesar 83.20 yang dihasilkan dari masing - masing nilai komponen sebesar 27.6 pada komponen perencanaan kinerja, 27.6 pada pengukuran kinerja, 13.95 pada pelaporan kinerja dan 21.75 pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tahun Berjalan	2022	2023	2024
Target Renstra	A	A	A
Capaian	A	A	AA
Presentase	100%	100%	101%

Selama 2 Tahun berturut - turut Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dapat mendapatkan nilai A untuk predikat SAKIP dan pada tahun 2024 ini dapat mencapai predikat AA. Lebih dari itu, setiap tahunnya selalu meningkat nilai capaiannya.

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah

- Pengalaman tim pelaksana SAKIP yang sudah cukup mendalami proses penyusunan SAKIP.
- Rekomendasi yang jelas dari TIM Evaluasi SAKIP (Inspektorat Jenderal) sehingga proses pelaksanaan SAKIP bisa terus meningkat setiap tahunnya.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

- Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:
- Memastikan kembali pengisian RPD halaman 3 DIPA sehingga target capaian IKPA dapat dicapai

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini. Strategi - strategi tersebut adalah:

- Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada LHE tahun 2023, Pelaksanaan SAKIP pada tahun 2024 ini sudah ditingkatkan.
- Melaksanakan tindak lanjut yang sudah disampaikan dalam Hasil Evaluasi Final Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Capaian IKK Indikator Kinerja predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini kami anggap sebagai suatu keberhasilan karena sudah mencapai dan melebihi target yang kami buat di awal tahun.

IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 variabel:

1. Tindak lanjut Kementerian/Lembaga atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
2. Indeks perencanaan pembangunan nasional yang dinilai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80% - 90%	Baik
>60% - 80%	Cukup
>50% - 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran	IKK	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
					Target PK	Capaian	% Capaian PK		
Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai	96%	95.13	95.13	98.99	104%	95.13	104%

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun berjalan telah mencapai, bahkan melebihi target yang sudah ditentukan.

Capaian nilai NKA sebesar 98,99. Capaian ini menunjukkan jika Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berapa pada kelompok Sangat Baik untuk capaian Kinerja Anggarannya.

IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini pada tahun kedua ini dapat mencapai target yang sudah direncanakan dalam renstra.

Tahun Berjalan	2022	2023	2024
Target Renstra	90,8	90,8	90,8
Capaian	87,71	95,13	98,99
Presentase	96%	105%	109%

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah

- Ketepatan dalam menyusun rencana kegiatan, hal tersebut akan berpengaruh terhadap prognosis penggunaan anggaran yang akan tercermin pada indikator Rencana Penarikan Dana dan Deviasi Hal III DIPA.
- Perencanaan penggunaan sumber dana baik yang berasal dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
- Peningkatan efisiensi dalam pencapaian output.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

- Terjadi perubahan RPD halaman 3 DIPA oleh sistem pada bulan januari di salah satu RO yang berubah dari yang sudah diinputkan sehingga capaian IKPA TW 1 di bawah target.
- Jumlah peserta kegiatan dan perubahan penjadwalan di tengah - tengah triwulan membuat RPD Hal III DIPA yang sudah disusun kurang bisa maksimal untuk pelaksanaannya.
- Kurangnya uang makan bulan desember karena perubahan perhitungan staf yang tidak melaksanakan perjadiin akibat dari blokir perjadiin karena kebijakan nasional

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

- Memastikan kembali pengisian RPD halaman 3 DIPA sehingga target capaian IKPA dapat dicapai
- Penjadwalan di akhir triwulan untuk triwulan berikutnya dibuat dengan lebih presisi sehingga perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih baik.
- Perubahan RAB anggaran untuk uang makan PNS yang dilakukan menggunakan metode pemuatkhiran KPA

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Nilai Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini. Strategi - strategi tersebut adalah:

- Terus melakukan update penganggaran secara tepat waktu pada aplikasi SAKTI agar halaman III dipa tetap sesuai dengan penggunaan anggaran.
- Melakukan revisi POK seoptimal mungkin sehingga jumlah revisi POK dapat ditekan.

Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini kami anggap sebagai suatu keberhasilan karena sudah mencapai dan melebihi target yang kami buat di awal tahun.

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

No	Nama Program Prioritas	Output		Alokasi Anggaran	
		Target	Capaian	PAGU	Realisasi
1	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	15	15	Rp 16.067.685.000	Rp 14.482.706.875
2	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	3	3	Rp 6.420.396.000	Rp 6.020.539.919
3	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	10	11	Rp 11.188.723.000	Rp 10.223.488.191

C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp 48.243.793.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil terealisasikan sebesar Rp 44.701.500.424 dengan persentase daya serap sebesar 93%. Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran PSKP.

Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2024 PSKP:

No	Rincian Output	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	[DI.6696.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	Rp 16.067.685.000	Rp 14.482.706.875	90%
2	[DI.6696.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	Rp 6.420.396.000	Rp 6.020.539.919	94%
3	[DI.6696.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	Rp 11.188.723.000	Rp 10.223.488.191	91%
4	[WA.2032.EBA.956] Layanan BMN (SBKU)	Dokumen	Rp 10.000.000	Rp 9.483.851	95%

No	Rincian Output	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
5	[WA.2032.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	Rp 990.000.000	Rp 946.453.212	96%
6	[WA.2032.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	Rp 13.566.989.000	Rp 13.018.828.376	96%
Total Anggaran			Rp 48.243.793.000	Rp 44.701.500.424	93%

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.542.292.576 atau sekitar 7.34% dari total anggaran. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari efisiensi berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang perlu dilaksanakan dan yang lebih prioritas seperti Penyusunan Peta Jalan Pendidikan, Evaluasi Program Makan Siang Bergizi dan Evaluasi Standar/Program Diksi.

D. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan PSKP

Selama 2 Tahun berturut - turut Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dapat mendapatkan nilai A untuk predikat SAKIP dan pada tahun 2024 ini dapat mencapai predikat AA.

2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi

Sejak tahun 2022 PSKP telah berkomitmen untuk menciptakan Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi, dan pada tahun 2024 upaya pembangunan tersebut menorehkan capaian baru yaitu mampu untuk mencapai tahap penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

3. Keterbukaan Informasi kepada publik

Sejak awal PSKP berdiri Tahun 2022, PSKP sudah membuka informasi kepada publik melalui laman pskp.kemdikbud.go.id. Dalam laman tersebut terdapat berbagai hasil kerja PSKP seperti risalah kebijakan, jurnal, dan infografis, dan informasi lain terkait program kemendikbud lainnya. Selain daripada itu, dalam laman tersebut juga terdapat data - data terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti Perjanjian Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Laporan kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Inovasi

Pada tahun 2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan melakukan inovasi berupa sistem pencatatan/pelaporan kinerja pegawai. Pada sistem tersebut, manajemen PSKP memilih beberapa staf sebagai tim penyusun KPI pegawai untuk menyusun skema Pencatatan hasil penugasan pegawai untuk membantu manajemen untuk melakukan penilaian kinerja pegawai secara objektif. Pencatatan penugasan ini meliputi penugasan rutin dan penugasan tambahan. Penugasan rutin adalah penugasan kepada pegawai sesuai dengan rencana SKP yang sudah disusun oleh pegawai. Pada penugasan rutin, PIC kegiatan dapat memberikan nilai atas hasil kerja tim yang diberikan penugasan yang selanjutnya digunakan oleh Ketua Tim untuk menentukan kinerja pegawai yang ditugaskan.

Selain daripada itu juga terdapat pencatatan penugasan tambahan dimana penugasan ini diberikan kepada pegawai sebagai tambahan diluar rencana SKP yang sudah disusun pada awal tahun. Ketua Tim akan menilai hasil kerja pegawai yang sudah ditugaskan dan hasil kerja yang sudah diunggah atau disematkan dalam aplikasi pencatatan ini.

Klik pada tombol dibawah sesuai Kategori Penugasan yang akan dilaporkan

Tugas Rutin
Pelaporan **tugas rutin** dilakukan oleh **Ketua Tim** (hasil kerja dari Tim Kerja atau Tim Kajian sesuai dengan SK Tim Kerja yang mendukung Hasil Kerja Utama)

Tugas Tambahan
Pelaporan **tugas tambahan** dilakukan oleh **masing-masing Pegawai** yang melaksanakan tugas tambahan tersebut (hasil kerja dari masing-masing Individu Pegawai atas penugasan/pemenuhan pimpinan yang mendukung pencapaian kinerja PSKP dan/atau pengembangan karier pegawai)

Panduan Penggunaan Aplikasi Pendataan Kinerja Pegawai

Input Pelaporan TUGAS RUTIN
Salam hormat Bapak/Ibu Pegawai di lingkungan PSKP;
Dalam rangka **pendataan kontribusi pegawai di lingkungan PSKP**, melalui formulir ini Bapak/Ibu PIC/ketua tim kerja kajian/kegiatan dapat menyampaikan **progress/hasil output** pelaksanaan kerja di **tiap bulan** yang **sedang/sudah** dihasilkan oleh tim kajian/kegiatan.
Definisi Tugas Rutin
Tugas yang dilakukan pegawai secara berulang dan berkala, dengan sifat dan kompleksitas yang relatif sama, sesuai yang tercantum dalam Rencana SKP untuk mendukung hasil kerja utama.
Ruang Lingkup Tugas Rutin
Mendukung pencapaian kinerja internal PSKP; yang tertuang dalam Rencana SKP pegawai
Bukti Penugasan Tugas Rutin

- Surat Keputusan (SK) Internal PSKP
- Nota Dinas / Memo Penugasan
- Surat Tugas

Input Pelaporan TUGAS TAMBAHAN
Salam hormat Bapak/Ibu Pegawai di lingkungan PSKP;
Dalam rangka **pendataan kontribusi pegawai di lingkungan PSKP**, melalui formulir ini Bapak/Ibu (Sebagai Individu penerima tugas tambahan) dapat **menyampaikan penugasan tugas tambahan** yang **sudah mulai/selesai** Bapak/Ibu laksanakan/kerjakan dan **sudah Bapak/Ibu sampaikan/laporkan ke pemberi tugas tambahan** (Kepala Pusat/Kasubag TU/Ketua Tim/Koordinator).
Definisi Tugas Tambahan
Tugas yang diberikan kepada pegawai di luar tugas rutusnya, yang bersifat insidental, temporer, atau tidak terduga, diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, situasi dan kondisi tertentu, atau sebagai pengembangan kompetensi pegawai.
Ruang Lingkup Tugas Tambahan

- Mendukung permintaan dari/untuk eksternal PSKP
- Mendukung tim kerja/kajian lain di internal PSKP (diluar rencana SKP)
- Inisiatif pribadi yang terkait pemenuhan kinerja jabatan atau inovasi yang mendukung Tusi PSKP

Bukti Penugasan Tugas Tambahan

3. Penghargaan

Pada tahun 2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mendapatkan penghargaan:

a. Penghargaan atas indikator laporan keuangan terbaik



Penghargaan sebagai satker terbaik berdasarkan indikator laporan keuangan terbaik Tahun 2024 yang diberikan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

- b. Penghargaan atas pembangunan ZI WBK di lingkungan Kemendikbudristek



Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada PSKP pada tanggal 15 Agustus Tahun 2025 atas keberhasilan PSKP dalam membangun Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kemendikbud Ristek.

4. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan melakukan program crosscutting/collaborative dengan berbagai pihak antara lain::

- a. Evaluasi sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan yang dikembangkan setiap tahunnya bersama dengan seluruh unit utama pembina di Kemendikbudristek dan lintas kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan lembaga lainnya dalam penyediaan data.
- b. Standar Pelayanan Minimum, merupakan standar atau acuan yang disepakati bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan.
- c. Penyusunan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemendikbudristek dan BAN PDM.

- d. Pada tahun 2024 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan melakukan beberapa kajian/analisis maupun evaluasi dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga mitra pendidikan di luar kemendikbudristek seperti:

1. UNICEF	6. INOVASI	11. Universitas Negeri Solo
2. PROSPERA	7. IDINSIGHT	12. Universitas Gajah Mada
3. J-PAL	8. WORLD BANK	13. Kementerian PPN/ BAPPENAS
4. GIZ	9. ARTICLE33	14. BRIN
5. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan	10. TANOTO FOUNDATION	



5. Kerja Sama

Beberapa kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan PSKP pada tahun 2024:

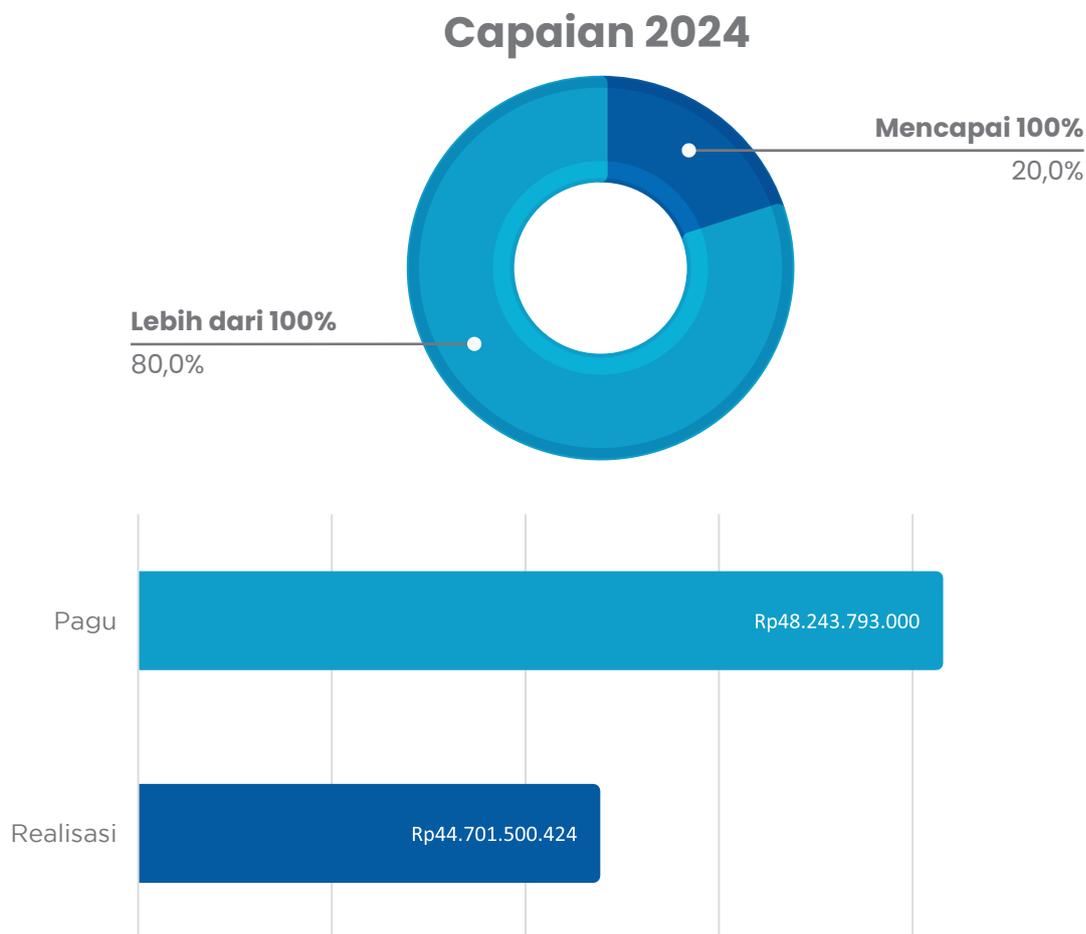
No	Nomor	Para Pihak	Judul Kerja Sama	Ruang Lingkup
1	NOMOR: 016/H1/KS.09.00/2024 NOMOR: KTR 030/PN-LPEM/VI/2024	BSKAP - JPAL	PENGGUNAAN DATA ASESMEN NASIONAL DAN DATA LAIN YANG DIKELOLA OLEH BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI DAMPAK PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA	Kolaborasi PARA PIHAK untuk pelaksanaan kajian Evaluasi Dampak Program-Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2	NOMOR: 424.GPE-ITU.VIII.2024 NOMOR: SP-001341/H2/SK/2024	Yayasan Save The Children Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SURAT PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA ANTARA YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERTUKARAN INFORMASI ATAS KEGIATAN PENGGUNAAN DATA RAPOR PENDIDIKAN TENTANG PENGGUNAAN DATA ASESMEN NASIONAL DAN DATA LAIN YANG DIKELOLA OLEH BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI DAMPAK PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA	Penyediaan data terkait penggunaan data Rapor Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Program GPE Multiplier Secara spesifik, informasi data rahasia meliputi: 1. Data Rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023; 2. Data Rapor Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024; 3. Data Rapor Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2023; dan 4. Data Rapor Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun.

No	Nomor	Para Pihak	Judul Kerja Sama	Ruang Lingkup
3	Nomor 4396/HI/ KS.09.00/2024 Nomor 1163/SPK/ XI/2024	BSKAP - PSPK	SURAT PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA ANTARA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN PUSAT STUDI PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN (PSPK)	Kolaborasi PARA PIHAK untuk pelaksanaan kajian Evaluasi Dampak Program- Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penyediaan data tingkat di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat di setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota
4	Nomor: 2481/H2/ PBJ/2024 Nomor: 405/UN11. PSKK/TU/PT/2024	PSKP - Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM	PKS PSKP - Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tentang Evaluasi Program Makan Siang Bergizi Tahun Anggaran 2024	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi pelaksanaan Evaluasi Progra Makan Siang Bergizi Tahun Anggaran 2024

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2024, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Kinerja Pusat standar dan kebijakan pendidikan tahun 2021, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 104,8% dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Secara keseluruhan capaian kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 44.701.500.424 atau 92,66% dari total pagu sebesar Rp 48.243.793.000.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kolaborasi serta kemitraan dengan pihak eksternal perlu dikembangkan dengan lebih baik lagi
2. Peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni
3. Advokasi kebijakan yang belum terencana dan terstruktur dengan baik

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan pihak eksternal terkait dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan rekomendasi standar sejak awal Tahun 2025
2. Penambahan pegawai PNS dan PPPK untuk meningkatkan jumlah SDM serta memberikan kesempatan kepada staf PSKP untuk mengikuti lebih banyak lagi pelatihan agar kemampuan SDM PSKP dapat meningkat
3. Advokasi kebijakan sejak awal tahun sudah direncanakan sesuai dengan hasil evaluasi tahun 2024. Perubahan dalam rencana advokasi terjadi baik pada cara advokasi, peserta advokasi dan materi advokasi yang sudah disusun sejak awal tahun 2025

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2022-2024, dapat dikatakan bahwa PSKP telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

Lampiran

1. Pernyataan telah direviu

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025
Ketua Tim Reviu,



Andry Rihardika

2. Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani
Jabatan : Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Anindito Aditomo
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan,



Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	18
[1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10
[1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	21
[2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	95.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp. 17.145.118.000,-
2.	6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp. 33.676.804.000,-
Total Anggaran			Rp. 50.821.922.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,



Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



3. Perjanjian Kinerja Revisi



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani
Jabatan : Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Anindito Aditomo
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Anindito Aditomo

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	18
	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	10
	[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	Rekomendasi Kebijakan	21
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai	95.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp 14.566.989.000
2	6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp 33.676.804.000
Total Anggaran			Rp 48.243.793.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Standar, Kurikulum,
 dan Asesmen Pendidikan
 Anindito Aditomo

Jakarta, 18 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
 Pendidikan
 Irsyad Zamjani

4. Laporan Kinerja Triwulan I



Laporan Kinerja Triwulan I Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	18	Rekomendasi Kebijakan	0	0
2.	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	Rekomendasi Kebijakan	0	0
3.	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	21	Rekomendasi Kebijakan	0	0
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	Predikat	-	-



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
5.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	95.13	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

1. [SK 1.0 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan] IKK 1.1 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Progress / Kegiatan :

Progres yang sudah dilaksanakan:

- Studi Cepat Kajian RENSTRA 2025-2029 sudah melaksanakan tahapan penyusunan desain.
- Studi Mendalam Kajian Perhitungan Unit Cost Standar Biaya sudah melaksanakan tahapan Uji Coba Instrumen.
- Studi Mendalam Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar telah melaksanakan tahapan Uji Coba Instrumen.
- Evaluasi Kurikulum Merdeka sudah melaksanakan tahapan Review Instrumen Evaluasi Implementasi Pertama dari dua kegiatan di tahapan tersebut.
- Evaluasi Pembudayaan Literasi telah melaksanakan validasi data menggunakan telepon.
- Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan pada Program SMK PK sudah melaksanakan Review Instrumen Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan pertama dari dua kegiatan pada tahapan tersebut.
- Pembangunan Zona Integritas sudah melaksanakan dua tahapan pelaksanaan.
- Pengelolaan Rapor Pendidikan sudah melaksanakan tujuh tahapan Alih Teknologi Rapor Pendidikan.
- Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan sudah melaksanakan empat kali tahapan Analisis Data Rapor Pendidikan.
- Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sudah melaksanakan dua tahapan Penyusunan Desain.
- Analisis Evaluasi Dampak sudah melaksanakan dua kali tahapan Penyusunan Desain.

Kendala / Permasalahan :



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala yang muncul adalah:

1. Kendala pada jaringan saat melaksanakan validasi data di daerah.

Strategi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Menggunakan koneksi internet staf untuk hotspot siswa dalam melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer secara online.

2. [SK 1.0 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan] IKK 1.2 Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Progress / Kegiatan :

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Penyusunan Juknis Rombel Standar Pengelolaan sudah melaksanakan dua tahapan penyusunan desain standar.
2. Evaluasi BOP PAUD sudah melaksanakan satu tahapan Penyusunan Desain Evaluasi Standar Nasional.
3. Pengembangan kerangka sekolah berkualitas sudah melaksanakan dua kegiatan Penyusunan Desain Evaluasi Standar Nasional.
4. Pengembangan Standar Pendidik sudah melaksanakan tahapan Penyusunan Desain Standar.
5. Pengembangan Standar Tendik lainnya sudah melaksanakan tahapan Penyusunan Desain Standar.
6. Penyusunan regulasi pengelolaan peserta didik CIBI sudah melaksanakan tahapan Penyusunan Desain Standar.
7. Evaluasi BOS Kinerja sudah melaksanakan satu tahapan Penyusunan Desain Evaluasi Standar Nasional.
8. Kajian Pendidikan Jarak Jauh sudah melaksanakan satu tahapan Penyusunan Desain Evaluasi Standar Nasional.
9. Kajian Penyeleraaan Nomenklatur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sudah melaksanakan satu tahapan Penyusunan Desain Evaluasi Standar Nasional.

Kendala / Permasalahan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala yang muncul adalah:

1. Kesulitan dalam mencari narasumber dari Badan Akreditasi Nasional karena kesibukan dari anggota BAN
2. Kesulitan untuk menentukan NSPK landasan dalam menyusun upskilling dan reskilling guru SMK
3. Kebutuhan untuk bantuan konsultan dalam melaksanakan evaluasi standar

Strategi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional untuk menyamakan jadwal
2. Menggunakan Permendikbud no 34 Tahun 2018 sebagai landasan Upskilling dan Reskilling guru SMK
3. Menggunakan jasa konsultan yang disewa untuk membantu proses evaluasi standar

3. [SK 1.0 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan] IKK 1.3 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis

Progress / Kegiatan :

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Advokasi dan Publikasi Kebijakan sudah melaksanakan 3 tahapan penyusunan desain.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang muncul adalah:

1. Masih terdapat miskonsepsi terhadap rekomendasi kebijakan.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Melakukan FGD pada masing - masing ketua tim untuk menggali tema advokasi yang tepat.

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan] IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Laporan Kinerja Tahun 2023 sudah dibuat tepat waktu.
2. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat sudah ditandatangani tepat waktu.
3. Rencana Aksi sudah disusun.
4. Pengukuran Kinerja Triwulan satu sudah disusun tepat waktu.
5. Tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 sudah dilaksanakan.
6. Kepala Pusat mengikuti dan berperan dalam setiap tahapan pelaksanaan SAKIP.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang muncul adalah:

belum ada kendala yang muncul

Strategi / Tindak Lanjut :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Melaksanakan tahapan SAKIP Satker tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berjalan.

5. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran dengan efektif dan efisien.
2. Melaksanakan revisi halaman 3 DIPA tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berjalan.
3. Melakukan perencanaan prognosis penggunaan anggaran yang akurat menyesuaikan rencana pelaksanaan anggaran.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang muncul adalah:

1. Terjadi perubahan RPD halaman 3 DIPA oleh sistem pada bulan januari di salah satu RO yang berubah dari yang sudah diinputkan sehingga capaian IKPA TW 1 di bawah target.

Strategi / Tindak Lanjut :

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Memastikan kembali pengisian RPD halaman 3 DIPA sehingga target capaian IKPA dapat dicapai



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan I

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690517.DI.6696.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	0	15	16.067.685.000	1.661.055.165	14.406.629.835
[690517.DI.6696.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	0	3	6.420.396.000	1.242.631.866	5.177.764.134
[690517.DI.6696.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	0	10	11.188.723.000	1.631.388.510	9.557.334.490
[690517.WA.2032.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	1.000.000.000	23.919.398	976.080.602
[690517.WA.2032.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	16.145.118.000	2.825.362.827	13.319.755.173
Total					50.821.922.000	7.384.357.766	43.437.564.234

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Memetakan kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi terutama yang dilakukan di daerah agar dapat dialokasikan dalam penganggaran
2. Melakukan koordinasi secara rutin dengan BAN PDM untuk penentuan jadwal pelibatan Anggota BAN PDM dalam penyusunan standar.
3. Melakukan rapat secara daring atau menyampaikan secara tertulis kepada BAN PDM kemajuan penyusunan standar
4. Melakukan penjadwalan dalam setiap tim dan melakukan pembaharuan terhadap jadwal tersebut secara rutin

Jakarta, 20 Mei 2024
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Irsyad Zamjani
NIP 198008302009121002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



5. Laporan Kinerja Triwulan II



Laporan Kinerja Triwulan 2 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	18	Rekomendasi Kebijakan	0	3
2.	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	Rekomendasi Kebijakan	0	0
3.	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	21	Rekomendasi Kebijakan	0	0
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	Predikat	-	-

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
5.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	95.13	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. | SK 1.0 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan | IKK 1.1 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Progress / Kegiatan:

Progres yang sudah dilaksanakan:

- (Studi Cepat) Analisis hasil-hasil Money untuk Penguatan Narasi MB telah melaksanakan tahapan penyusunan laporan ke 1 dari 2
- (Studi Cepat) Kajian RENSTRA 2025-2029 telah melaksanakan tahapan penyusunan laporan ke 1 dari 2
- (Studi Cepat) Kajian Perhitungan Unit Cost Standar Biaya telah melaksanakan tahapan penyusunan laporan ke 1 dari 2
- (Studi Cepat) Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar telah melaksanakan tahapan penyusunan laporan ke 1 dari 2
- (Studi Mendalam) Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar telah melaksanakan tahapan pengolahan dan analisis data ke 1 dari 2
- Evaluasi Kurikulum Merdeka telah melaksanakan Kunjungan lapangan implementasi IKM ke 2 dari 6
- Evaluasi Pembudayaan Literasi telah melaksanakan Kunjungan Lapangan Kualitatif ke 7 dari 7
- Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan pada Program SMK PK telah melaksanakan tahapan spotcheck ke 7 dari 10
- Pembangunan Zona Integritas telah melaksanakan tahapan pelaksanaan ke 4 sampai 6
- Pengelolaan Rapor Pendidikan telah melaksanakan tahapan Alih Teknologi Rapor Pendidikan ke 9 dari 15 pada tanggal 10 - 12 Juni 2024
- Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan telah melaksanakan tahapan Pengumpulan Data Analisis Kesetaraan pada tanggal 23 - 27 Juni 2024
- Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan telah melaksanakan tahapan penyusunan instrumen pada tanggal 1 April 2024
- Analisis Evaluasi Dampak telah melaksanakan tahapan Validasi Hasil Analisis Evaluasi Dampak ke 1 dari 6 pada tanggal 10 -15 Juni 2024
- Advokasi Kemitraan Rekomendasi Kebijakan Kemdikbud Ristek sudah melaksanakan tahapan ke 2 dari 5 pada tanggal 19 - 21 Juni 2024

Tindak lanjut rekomendasi pimpinan TW I:

Terkait Renstra 2025 - 2029, PSKP telah melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan kajian untuk mendukung penyusunan Renstra 2025-2029. Dalam kegiatan tersebut telah melibatkan Biro Perencanaan, Direktorat Teknis terkait, maupun pihak-pihak lain. Pada saat ini telah tersusun draft awal kajian renstra dan masih akan terus disempurnakan sesuai dengan masukan

Terkait Peta Jalan pendidikan, PSKP bersama Bappenas telah melakukan 2 kali FGD untuk menyusun peta jalan pendidikan dengan topik 1. Guru dan Tenaga Kependidikan dan 2. Pendidikan Vokasi dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan topik tersebut. Selanjutnya akan diadakan konsinyering bersama untuk mempersiapkan draft Peta Jalan Pendidikan dan dilanjutkan dengan menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik.

Pemilihan narasumber daerah yang akan diambil datanya secara kualitatif dengan wawancara agar memperbanyak informasi yang dilakukan. Sebagai contoh, penambahan narasumber guru pada saat wawancara di sekolah terkait Implementasi Kurikulum Merdeka yang sebelumnya hanya Kepala Sekolah saja.

Pembaharuan penjadwalan kegiatan dilakukan setiap akhir triwulan sehingga datanya dapat digunakan untuk menyusun kebutuhan anggaran dan monitoring pelaksanaan progress pencapaian output.

Kendala / Permasalahan:

Kendala yang muncul adalah:

1. Terdapat penambahan ruang lingkup dalam evaluasi SMK PK untuk memperdalam mengenai kesenjangan literasi dan numerasi antara SMA dan SMK.

Strategi / Tindak Lanjut:

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Membekali data rapor pendidikan terkait capaian literasi dan numerasi di satdik sasaran, dan memberikan prosedur tambahan kepada peneliti lapangan untuk memperdalam pengamatan terkait literasi dan numerasi

2. | SK 1.0 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan | IKK 1.2 Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Progress / Kegiatan:

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Penyusunan Juknis Rombel Standar Pengelolaan telah melaksanakan tahapan Penelaahan dan Penyempurnaan Draf Standar ke 1 dari 1
2. Evaluasi BOP PAUD telah melaksanakan tahapan Pengumpulan Data ke 5 dari 6
3. Pengembangan kerangka sekolah berkualitas telah melaksanakan tahapan Pengolahan dan Analisis Data evaluasi standar pendidikan ke 2 dari 2
4. Sosialisasi Kebijakan Standar Pendidikan telah melaksanakan tahapan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Standar Pendidikan ke 5 dari 5
5. Pengembangan Standar Pendidik telah melaksanakan tahapan Uji Publik ke 2 dari 3
6. Pengembangan Standar Pendidik lainnya telah melaksanakan tahapan Uji Publik ke 2 dari 3
7. Penyusunan regulasi pengelolaan peserta didik CIBI telah melaksanakan tahapan Uji Publik ke 2 dari 3
8. Evaluasi BOS Kinerja telah melaksanakan tahapan Pengumpulan Data ke 4 dari 5
9. Kajian Pendidikan Jarak Jauh telah melaksanakan tahapan Pengolahan dan Analisis Data evaluasi standar pendidikan ke 1 dari 2
10. Kajian Penyelarasan Nomenklatur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus telah melaksanakan tahapan Pengolahan dan Analisis Data evaluasi standar pendidikan ke 2 dari 2.

Tindak lanjut rekomendasi pimpinan TW I:

Setiap tahapan penyusunan standar yang substansinya terkait dengan akreditasi selalu mengundang perwakilan dari BAN PDM, dan dipastikan jika diskusi yang sudah dilakukan untuk penyusunan standar sudah disampaikan kepada BAN PDM.

Pembaharuan penjadwalan kegiatan dilakukan setiap akhir triwulan sehingga datanya dapat digunakan untuk menyusun kebutuhan anggaran dan monitoring pelaksanaan progress pencapaian output.

Kendala / Permasalahan:

Kendala yang muncul adalah:

1. Pada Kajian penghitungan unit cost standar binya terdapat kebutuhan penambahan ruang lingkup kajian dari Ditjen Vokasi berupa 128 komponen keahlian di 16 lokasi
2. Pada Kajian School Excellent Framework, terdapat kendala kesulitan untuk mengakses literatur pada negara tertentu
3. Pada Penyusunan Juknis Rombel terdapat kendala berupa potensi dampak negatif dari juknis tersebut dengan kebijakan strategis yang lain

Strategi / Tindak Lanjut:

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Bekerjasama berbagi sumberdaya dengan Ditjen Vokasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
2. Memanfaatkan data sekunder dan literatur yang telah dimiliki oleh Ditjen Paud Dasmien mengenai negara tersebut
3. Meng-ekskalasi permasalahan tersebut ke Dewan Pengarah agar mendapatkan arahan yang sinergi dengan kebijakan-kebijakan yang lain

3. | SK 1.0 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan | IKK 1.3 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis

Progress / Kegiatan:

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Advokasi Kemitraan Rekomendasi Kebijakan Kemdikbud Ristek sudah melaksanakan tahapan ke 2 dari 5 pada tanggal 19 - 21 Juni 2024.
2. Sosialisasi Kebijakan Standar Pendidikan telah melaksanakan tahapan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Standar Pendidikan ke 5 dari 5

Kendala / Permasalahan:

Kendala yang muncul adalah:

Fokus saat pelaksanaan kegiatan sampai pertengahan tahun ini masih kepada pencapaian output, belum kepada advokasi/sosialisasi rekomendasi kebijakan dan standar.

Strategi / Tindak Lanjut:

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

Proses advokasi/sosialisasi rekomendasi kebijakan dan standar akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya

4. | SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan | IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Progress / Kegiatan:

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Evaluasi/Pengukuran Kinerja TW I telah dilaksanakan tepat waktu
2. Data Dukung Evaluasi SAKIP Tahun 2024 sudah disusun secara komprehensif dan disusun tepat waktu

Kendala / Permasalahan:

Kendala yang muncul adalah:

belum ada kendala yang muncul

Strategi / Tindak Lanjut:

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

Belum ada tindak lanjut karena belum ada kendala

5. | SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan | IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Progress / Kegiatan:

Progres yang sudah dilaksanakan:

1. Revisi RPD Halaman III DIPA dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang sudah dilaksanakan
2. Prognosis penggunaan anggaran sudah disusun sesuai dengan penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran oleh masing - masing tim.
3. Proses revisi Anggaran POK 3 sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan data dukung yang lengkap.
4. Pemindehan anggaran dari gaji ke layanan perkantoran sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan data dukung yang lengkap.

Tindak lanjut rekomendasi pimpinan TW I:

Pembaharuan penjadwalan kegiatan dilakukan setiap akhir triwulan sehingga datanya dapat digunakan untuk menyusun kebutuhan anggaran dan monitoring pelaksanaan progress pencapaian output.

Kendala / Permasalahan:

Kendala yang muncul adalah:

1. Jumlah peserta kegiatan dan perubahan penjadwalan di tengah - tengah triwulan membuat RPD Hal III DIPA yang sudah disusun kurang bisa maksimal untuk pelaksanaannya.

Strategi / Tindak Lanjut:

Tindak lanjut untuk kendala yang muncul adalah:

1. Penjadwalan di akhir triwulan untuk triwulan berikutnya dibuat dengan lebih presisi sehingga perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690517.DI.6696.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	3	12	16.067.685.000	3.771.749.047	12.295.935.953
[690517.DI.6696.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	0	3	6.420.396.000	2.731.454.093	3.688.941.907
[690517.DI.6696.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	0	10	11.188.723.000	4.577.015.310	6.611.707.69
[690517.WA.2032.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	1.000.000.000	381.094.599	618.905.401

[690517.WA.2032.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	16.145.118.000	6.802.749.349	9.342.368.651
Total					50.821.922.000	18.264.062.398	32.557.859.602

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Stakeholder management agar dilakukan dari proses penyusunan desain analisis, evaluasi, atau kajian, agar dapat terpetakan ruang lingkup pekerjaan dengan tepat.
2. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sebisa mungkin dilakukan pada triwulan yang sama dengan jadwal apabila memang akan ada perubahan jadwal
3. Segala rekomendasi kebijakan yang disusun sebisa mungkin tidak bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada, kecuali jika memang ada evaluasi terkait kebijakan tersebut.

Jakarta, 7 Agustus 2024

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,



6. Laporan Kinerja Triwulan III



Laporan Kinerja Triwulan 3 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan				
[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	18	Rekomendasi Kebijakan	8	8
[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	Rekomendasi Kebijakan	5	5
[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	21	Rekomendasi Kebijakan	10	10
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	95.13	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Progress/Kegiatan

Progres kegiatan analisis kebijakan pendidikan telah dilakukan :

1. Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar (tahap 9 dari 14)
2. Evaluasi Kurikulum Merdeka (tahap 17 dari 22)
3. Evaluasi Pembudayaan Literasi / Baseline (tahap 29 dari 38)
6. Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan SMK PK (tahap 19 dari 28)
7. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Cepat) Analisis hasil-hasil Monev untuk Penguatan Narasi MB (tahap 2 dari 7).

8. Evaluasi Program Makan Siang Bergizi
9. Analisis Data Evaluasi Sistem Pendidikan (tahap 30 dari 31)
10. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan (tahap 19 dari 23)
11. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan (tahap 12 dari 15)
12. Analisis Evaluasi Dampak (tahap 11 dari 15)

Pelaksanaan tindak lanjut TW 2:

Peneliti lapangan yang melakukan validasi data di lapangan sudah diberikan data capaian literasi dan numerasi dari sasaran observasi dan dalam instrumen sudah diberikan keterangan tambahan untuk memperdalam capaian literasi numerasi

Capaian :

1. Kajian Renstra Kemdikbudristek 2025-2029, Mewujudkan Pembelajaran Berpusat pada Siswa : Transformasi Sistem Pendidikan Melalui "Merdeka Belajar"
2. Dampak IKM
3. Kajian Perhitungan Unit Cost Standar Biaya
4. Tinjauan Bukti: Program SMK Pusat Keunggulan (PK)
5. Tinjauan Bukti: Program Sekolah Penggerak
6. Tinjauan Bukti: Implementasi Kurikulum Merdeka
7. Peta Jalan Pendidikan
8. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan

Kendala/Permasalahan

1. Kebutuhan data pendukung untuk analisis yang tidak dimiliki oleh PSKP.
2. Data AN Perlu analisis lebih lanjut sebelum bisa untuk digunakan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan pihak terkait pemilik data untuk pemenuhan data pendukung tersebut.
2. Proses simulasi analisa dilakukan berulang kali dengan cara yang berbeda.

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Progress/Kegiatan

Progres Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan telah dilakukan :

1. Penyusunan Juknis Rombel Standar Pengelolaan (tahap 10 dari 12)
2. Penyusunan Desain Evaluasi BOP PAUD (tahap 8 dari 10)
3. Penyusunan Desain Evaluasi BOS Kinerja (tahap 7 dari 10)
4. Penyusunan Desain dan Pengumpulan Data Kajian Penyeleraan Nomenklatur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (tahap 5 dari 7)
5. Evaluasi Standar/Program Diksi

Pelaksanaan tindak lanjut TW 2:

1. Koordinasi dengan Ditjen Vokasi terkait 128 komponen keahlian di 16 lokasi sudah dilaksanakan dengan mengundang dalam kegiatan pembahasan Kajian penghitungan unit cost standar biaya

2. Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Lembaga Bantuan dari negara yang dibutuhkan literatur terkait standarnya sudah dilakukan dan dokumen literatur tersebut dimintakan melalui jalur tersebut
3. Penyesuaian pada Juknis Rombel sudah dilakukan agar tidak terdampak negative pada kebijakan strategis lainnya.

Capaian :

1. Kajian Pendidikan Jarak Jauh
2. Pengembangan Standar Pendidik
3. Pengembangan Standar Tendik lainnya
4. Penyusunan regulasi pengelolaan pesertadidik CIBI
5. Pengembangan kerangka sekolah berkualitas

Kendala/Permasalahan

1. Adanya keterbatasan anggota BAN PDM yang ditugaskan sebagai penyusun SNP, dari 2 yang dimintakan hanya ditugaskan 1 anggota BAN PDM untuk setiap judul standar yang disusun.
2. Terdapat perluasan ruang lingkup dalam penyusunan Standar Tendik yang dikarenakan luasnya definisi Tenaga Pendidik sehingga memerlukan lebih banyak perwakilan dari pemangku kepentingan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tetap mengundang anggota BAN PDM tertentu yang dimungkinkan untuk berdiskusi bersama-sama
2. Melakukan optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelibatan stakeholder lain

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis

Progress/Kegiatan

Progres kajian yang rekoemndasinya sudah dimanfaatkan:

1. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Cepat) Analisis hasil-hasil Monev untuk Penguatan Narasi MB
2. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Cepat) Kajian RENSTRA 2025-2029
3. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Mendalam) Kajian Perhitungan Unit Cost Standar Biaya
4. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Mendalam) Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar
5. Pengelolaan Rapor Pendidikan
6. Penyusunan Juknis Rombel Standar Pengelolaan
7. Evaluasi BOP PAUD
8. Pengembangan kerangka sekolah berkualitas
9. Pengembangan Standar Pendidik
10. Penyusunan regulasi pengelolaan peserta didik CIBI

Pelaksanaan tindak lanjut TW 2:

1. Melaksanakan kegiatan advokasi rekomendasi kebijakan dengan mengundang pengampu kebijakan pendidikan di level kementerian.
2. Mengirimkan surat yang berisikan rekomendasi kebijakan kepada pengampu - pengampu kebijakan yang berkaitan dengan topik atau aktor rekoemndasi yang sudah dihasilkan

Kendala/Permasalahan

Belum ada kendala yang muncul

Strategi/Tindak Lanjut

Tetap melaksanakan advokasi agar rekomendasi baru yang sudah dihasilkan bisa dimanfaatkan.

**[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Progress/Kegiatan

Proses evaluasi AKIP sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data dukung evaluasi SAKIP 2024 sudah disusun secara komprehensif dan disusun tepat waktu.

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada kendala

**[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Progress/Kegiatan

Penarikan dana TUP/UP sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada triwulan 3

1. Pertanggungjawaban UP dan TUP sesuai waktu yang ditentukan.
2. Pelaporan LPJ Bendahara tepat waktu.
3. Revisi Pemutakhiran hal III DIPA.
4. Pelaporan capaian output tepat waktu pada aplikasi sakti.

Pelaksanaan tindak lanjut TW 2:

Penjadwalan pelaksanaan tahapan kegiatan sudah dioptimalkan sehingga perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih akurat

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada kendala

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6696.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	11	4	Rp16.067.685.000	Rp11.924.227.748	Rp4.143.457.252
[DI.6696.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	1	Rp6.420.396.000	Rp5.697.042.579	Rp723.353.421
[DI.6696.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	8	2	Rp11.188.723.000	Rp9.342.387.097	Rp1.846.335.903
[WA.2032.EBA.956] Layanan BMN (SBKU)	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.2032.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp990.000.000	Rp792.991.134	Rp197.008.866
[WA.2032.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp16.145.118.000	Rp11.111.715.516	Rp5.033.402.484
Total Anggaran					Rp50.821.922.000	Rp38.868.364.074	Rp11.953.557.926

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan optimalisasi anggaran, terutama untuk penguatan program yang sudah direncanakan ataupun inisiatif program baru
2. Melakukan identifikasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan PSKP

Jakarta, 5 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
 Pendidikan
 Irsyad Zamjani

7. Laporan Kinerja Triwulan 4



Laporan Kinerja Triwulan 4 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan				
[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	18	Rekomendasi Kebijakan	18	18
[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	Rekomendasi Kebijakan	10	11
[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	21	Rekomendasi Kebijakan	21	23
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	95.13	Nilai	95.13	98.54

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Progress/Kegiatan

Judul analisis kebijakan yang sudah diselesaikan:

1. Kajian Renstra Kemdikbudristek 2025-2029, Mewujudkan Pembelajaran Berpusat pada Siswa : Transformasi Sistem Pendidikan Melalui "Merdeka Belajar"
2. Dampak IKM
3. Kajian Perhitungan Unit Cost Standar Biaya

4. Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan pada Program SMK PK.
5. Tinjauan Bukti: Program Sekolah Penggerak
6. Tinjauan Bukti: Implementasi Kurikulum Merdeka
7. Peta Jalan Pendidikan
8. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan
9. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan
10. Pengelolaan Rapor Pendidikan
11. Kajian Evaluasi Program Indonesia Pintar
12. Evaluasi Pembudayaan Literasi / Baseline
13. Kajian Kebijakan Pendidikan (Studi Cepat) Analisis hasil-hasil Monev untuk Penguatan Narasi MB.
14. Evaluasi Program Makan Siang Bergizi
15. Analisis Data Evaluasi Sistem Pendidikan
16. Kajian Penguatan Pendidikan Non Formal.
17. Evaluasi Kurikulum Merdeka.
18. Evaluasi Pembudayaan Literasi

Kendala/Permasalahan

Kendala yang muncul:

1. Ketidaksihesuaian Jadwal dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan intervensi dan jadwal monev
2. Jumlah SDM belum memadai dan perlunya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM
3. Tahapan kegiatan tidak maksimal dilaksanakan karena ada kebijakan penghematan anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah atau akan dilakukan:

1. Penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan intervensi dan jadwal 3. monev
2. a. Sharing SDM antar tim dan rekrutmen peneliti lapangan
2. b. Fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang analisis data serta penyusunan rekomendasi dan publikasi kebijakan
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan prioritas kajian dan alternatif lain seperti rapat dalam kantor

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Progress/Kegiatan

Judul analisis standar yang sudah diselesaikan:

1. Kajian Pendidikan Jarak Jauh
2. Pengembangan Standar Pendidik
3. Pengembangan Standar Pendidik lainnya
4. Penyusunan regulasi pengelolaan pesertadidik CIBI
5. Pengembangan kerangka sekolah berkualitas
6. Penyusunan Juknis Rombel Standar Pengelolaan
7. Penyusunan Desain Evaluasi BOP PAUD
8. Penyusunan Desain Evaluasi BOS Kinerja
9. Penyusunan Desain dan Pengumpulan Data Kajian Penyeleraaan Nomenklatur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
10. Evaluasi Standar/Program Diksi
11. Evaluasi Standar Nasional Pendidikan

Kendala/Permasalahan

Kendala yang muncul:

1. Kurangnya jumlah SDM internal dalam penyusunan standar
2. Belum memadainya upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan standar agar relevan dengan isu/substansi/regulasi standar terkini
3. Ketidaksesuaian jadwal antara SDM eksternal dengan tim penyusun
4. Dalam proses penyusunan standar terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan sering kali tidak dapat ditangani oleh tim sehingga berujung pada kebuntuan.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah atau akan dilakukan:

1. Kolaborasi dengan SDM eksternal
2. Penambahan aktivitas peningkatan kapasitas SDM dalam isu/substansi/regulasi melalui pembinaan secara internal dan pelatihan/Bimtek/Seminar dengan melibatkan pihak eksternal
3. Penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal
4. Peningkatan kapasitas tim penyusun standar dalam mengelola aspirasi publik secara produktif melalui pembinaan secara internal dan pelatihan dengan melibatkan pihak eksternal

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis

Progress/Kegiatan

Rekomendasi kebijakan yang sudah diasvokasi dan dimanfaatkan:

A. Rekomendasi Kebijakan

1. Pengembangan Indikator Rapor Pendidikan (Pengelolaan Rapor Pendidikan) dimanfaatkan dalam Rapor Pendidikan 2024
2. Hasil analisis rapor pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan (RPJPN) 2025-2045 oleh Bappenas (Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimum)
3. Hasil analisis evaluasi pemanfaatan evaluasi sistem pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 oleh Bappenas
4. Hasil Analisis Kesenjangan Pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan laporan capaian SDG's 4 Indonesia di Perancis

5. Hasil Analisis Rapor Pendidikan digunakan dalam penghitungan indeks Standar Pelayanan Minimum oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
6. Hasil Analisis Rapor Pendidikan digunakan dalam Surat Mendikbudristek No. 5190/MPK.A./RHS/PR.07.05/2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Hasil Analisis Evaluasi Dampak Program Organisasi Penggerak dimanfaatkan oleh Direktorat Guru Dikdas dan Direktorat Guru PAUD Dikmas sebagai laporan capaian Program Organisasi Penggerak
8. Hasil analisis modul evaluasi asesmen nasional (Persiapan, Tantangan, dan resiko) dimanfaatkan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Skala Nasional 2024 oleh Pusat Asesmen Pendidikan bersama 34 Dinas Pendidikan Provinsi
9. Evaluasi Pembudayaan Literasi sudah disampaikan kepada Badan Bahasa sebagai bahan pengajuan pembiayaan tahun berikutnya (2025)
10. Evaluasi Pembudayaan Literasi sudah disampaikan kepada POKJA PDM 10 dalam perbaikan program pelatihan dan pendampingan tahun berikutnya (2025)
11. Rekomendasi Proses Bisnis Pengembangan Rapor Pendidikan sudah digunakan dalam Kepmen Proses Bisnis Kemendikbudristek Tahun 2024 (nomor menyusul)
12. Hasil kajian PPDB digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
13. Hasil kajian Monitoring dan evaluasi pemanfaatan rapor pendidikan digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
14. Hasil kajian evaluasi implementasi kurikulum merdeka digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
15. Hasil kajian akademik penyusunan draft RPM PDPKBI (peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa) digunakan sebagai bahan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam DKT bersama SKM untuk diajukan kepada Mendikdasmen.
16. Hasil kajian Renstra digunakan oleh biro perencanaan untuk digunakan sebagai landasan menyusun renstra kemendikdasmen 2025 - 2029
17. Laporan evaluasi implementasi kurikulum merdeka menjadi bahan laporan perkembangan implementasi kurikulum nasional kepada menteri

B. Rekomendasi Standar

1. Pengembangan Standar Pendidik dimanfaatkan pada draft Permendikbudristek tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Pengembangan Standar Tendik lainnya dimanfaatkan pada draft Permendikbudristek tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Rombongan Belajar ditetapkan melalui SK Kepala BSKAP dan menjadi rujukan oleh POKJA PDM 08 Ditjen PDM dalam menyusun Panduan penyelenggaraan kelas rangkap.
4. Rekomendasi kajian Unit Cost dimanfaatkan direktorat SMK sebagai dasar penyusunan Draft Juknis BOS Majemuk pada tingkat program keahlian.

5. Rekomendasi kajian BOP PAUD dimanfaatkan direktorat PAUD sebagai bahan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan ARKAS bagi penyelenggara satuan PAUD

6. Rekomendasi kajian PIP dimanfaatkan oleh PUSLAPDIK dalam mengoptimalkan pengelolaan PIP oleh pemerintah daerah

Kendala/Permasalahan

Belum ada kendala yang muncul

Strategi/Tindak Lanjut

Belum ada kendala yang muncul

**[SK 2] Meningkatkan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Progress/Kegiatan

Progres yang sudah dilakukan:

1. Evaluasi TW IV sudah dilaksanakan.

Kendala/Permasalahan

Belum ada kendala yang muncul

Strategi/Tindak Lanjut

Belum ada kendala yang muncul

**[SK 2] Meningkatkan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Progress/Kegiatan

Progres yang sudah dilakukan:

1. Proses blokir perjadiin sesuai dengan kebijakan sudah dilakukan dengan baik
2. Pemutakhiran KPA untuk DIPA akhir tahun sudah dilaksanakan

Kendala/Permasalahan

Kendala yang muncul:

Kurangnya uang makan bulan desember karena perubahan perhitungan staf yang tidka melaksanakan

perjadi akibat dari blokir perjadi karena kbijakan nasional

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah dilakukan:

Perubahan RAB anggaran untk uang makan PNS yang dilakukan menggunakan metode pemutakhiran KPA

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6696.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	14	1	Rp16.067.685.000	Rp14.482.706.875	Rp1.584.978.125
[DI.6696.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	0	Rp6.420.396.000	Rp6.020.539.919	Rp399.856.081
[DI.6696.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	10	0	Rp11.188.723.000	Rp10.223.488.191	Rp965.234.809
[WA.2032.EBA.956] Layanan BMN (SBKU)	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp9.483.851	Rp516.149
[WA.2032.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp990.000.000	Rp946.453.212	Rp43.546.788
[WA.2032.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp13.566.989.000	Rp13.018.828.376	Rp548.160.624
Total Anggaran					Rp48.243.793.000	Rp44.701.500.424	Rp3.542.292.576

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Sinergi antar tim kerja perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun SDM pelaksana kegiatan, untuk memenuhi adanya kebutuhan kompetensi spesifik tertentu
2. Pelibatan pihak eksternal/organisasi mitra yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan maupun pengimbasan pengetahuan
3. Perlu merencanakan kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal untuk peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kedepan
4. Perlu melakukan exercise kebutuhan belanja pegawai secara lebih detail dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai

Jakarta, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik